

**Petrik Matanasi**

# **HARTONO**

**Jenderal Marinir di Tengah Prahara**



## **Hartono: Jenderal Marinir di Tengah Prahara**

Penulis : Petrik Matanasi

Editor : Rajib Rakatirta

Perwajahan Isi : Simages

Desain Sampul : Simages

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis.

**All Rights Reserved**

### **Diterbitkan oleh:**

Sibuku Media

Alamat : Ngringinan, Palbapang, Bantul, Bantul, Yogyakarta.

Hp. : 085643895795

E-mail : penerbitsibuku@gmail.com

Web : www.sibuku.com

### **Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

Petrik Matanasi, Hartono: Jenderal Marinir di Tengah Prahara;

Editor: Rajib Rakatirta—Cetakan 1—Yogyakarta: Sibuku Media, 2015

iv+ 64; 14 x 20 cm

ISBN: 978-602-0829-87-6

**Cetakan 1, 2015**

## **Pengantar**

Kali ini, Petrik akan memaparkan tentang sosok Letnan Jenderal KKO (Purn.) R. Hartono yang sangat loyal dengan Bung Karno. Bahkan kata-katanya yang terkenal, “Hitam kata Bung Karno, Hitam kata KKO, Putih kata Bung Karno, putih kata KKO”

R. Hartono (lahir di Solo, 1 Oktober 1927 – meninggal di Jakarta, 7 Januari 1971 pada umur 43 tahun) pernah menjabat sebagai Komandan KKO (sekarang Korps Marinir) dan Menteri/Wakil Panglima Angkatan Laut.

Tentunya, buku ini cukup menarik bagi para penikmat sejarah, terutama para pecinta sejarah militer Indonesia. Karena itu, buku ini pantas menjadi koleksi.

**Penerbit**

## **Daftar Isi**

**Pengantar ~ iii**

**Grace dan Hartono ~ 1**

**Pelaut Gerilya di Darat ~ 11**

**Bintang Melesat ~ 19**

**Hitam Kata Bung Karno Hitam Kata KKO ~ 32**

**Duta Besar di Negeri Terasing ~ 46**

**Hartono dalam Kronik ~ 51**

**Lampiran ~ 55**

**Referensi Bacaan ~ 60**

**Tentang Penulis ~ 63**

## Grace dan Hartono

PESAWAT dari Moskow baru saja mendarat. Grace Walandauw bersama keempat putrinya turun di Bandara Kemayoran. Tanpa tunggu lama, mereka segera pulang ke rumah karena sudah kelelahan akibat perjalanan panjang dari negeri paling terasing: Pyongyang, Korea Utara.

Tidak mudah menuju Jakarta dari Pyongyang. Tak ada pesawat langsung dari Pyongyang ke Jakarta, melainkan harus memutar melewati Moskow untuk menunggu pesawat ke Indonesia. Tak tiap hari ada jadwal penerbangan dari Pyongyang ke Moskow, hanya seminggu sekali. Selain itu harus menginap 2 hari di Moskow sebelum lanjut ke terbang menuju Jakarta lewat Singapura.<sup>1</sup>

“Nyonya Grace Barbara Walandauw, istri almarhum Letnan Jenderal KKO Hartono, beserta keempat putrinya yang masih kecil tiba di Jakarta Minggu petang. Mereka naik pesawat Thai International dari Bangkok, setelah sebelumnya hari Rabu telah meninggalkan Pyongyang ke Moskow, kemudian menuju Amsterdam. Begitu pesawat mendarat di Kemayoran pukul 18.45, para KKO dan pengawal berpakaian preman menjaga ketat tangga pesawat.....Kemudian tampak Nyonya Hartono menuruni tangga pesawat dengan perlahan-lahan, sambil mengusap air matanya.”<sup>2</sup>

Sesampai di Indonesia, Grace tinggal di kamar almarhum suaminya. Mereka tak bisa berlama-lama istirahat. Mereka harus ke Kalibata, bukan ke rumah famili, namun ke pemakaman—tempat orang-orang terhormat negeri ini dimakamkan— untuk menemui

---

1 Wawancara Nenny Hartono, 24 Juli 2015.

2 Kompas, 24 Januari 1971.

Hartono yang sudah terbaring abadi di sana. Di pusara Hartono, Grace menangis sedih atas kepergian suaminya itu. Begitu pun keempat putri Grace dan Hartono. Hartono mungkin damai di alam sana, tapi Grace tak mungkin damai di awal tahun itu. Dan, putri-putri Grace terlalu kecil untuk ditinggalkan ayah mereka. Rasanya tidak adil untuk mereka.

Hartono ditemukan tewas beberapa minggu sebelumnya. Sebuah peluru melubangi kepalanya. Ibu mertua Grace—ibunda Hartono, Nyonya Prawirosumarto menemukan anaknya tak bernyawa lagi subuh itu. Sang ibu hendak membuatkan minuman pada orang yang bertamu. Ketika di dapur sang ibu mendengar suara tembakan dan segera menemukan putranya tak lagi bernyawa.

Berita kematian Hartono membingungkan Grace. Waktu di Pyongyang, Grace dapat telegram dua kali tentang Hartono. Telegram pertama yang terlambat datang pada Grace menyebut: *Hartono sedang sakit keras*. Telegram kedua justru datang lebih cepat. Grace hanya bisa berkata, “Aku tidak percaya.”<sup>3</sup>

Grace mencari tahu penyebab kematian suaminya. Banyak pihak yang ia mintai keterangan. Pasca tahun baru 1971 adalah tahun memilukan bagi Grace dan juga anak-anaknya. Di sanalah mereka menangis sedih. Bukan tak ikhlas mereka atas kepergian Hartono, mereka hanya penasaran bagaimana Hartono meninggal.

Pistol—yang menurut pemerintah itu untuk bunuh diri—ditemukan tergeletak di dekat korban. Otopsi yang dilakukan di RSAD Gatot Subroto, dan bukan di RS Cipto Mangunkusumo atau di RSAL, memberi kesan bahwa kasus ini direkayasa dan ditutupi pemerintah. Hartono dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada 7 Januari 1971.<sup>4</sup>

---

3 Tempo, 6 Maret 1971, hlm. 11.

4 Forum Silaturahmi Anak Bangsa, *The Children of War*, Jakarta, Kompas, 2013, hlm. 125: *Pembunuhan Letjen (KKO) Hartono* <http://petromaks.wordpress.com/2006/02/page/2/> Diakses 16 September 2007 pukul 16.40.

Menurut Sinar Harapan, seperti dikutip Pikiran Rakyat, Adam Malik, Menteri Luar Negeri memberi keterangan bahwa Hartono meninggal karena pendarahan di otak, setelah didesak wartawan. Namun dirinya tak mau memberi kepastian lebih lanjut pada wartawan kala itu.<sup>5</sup> Sumber pemerintah pusat, yang diwakili Laksamana Sudomo menyebut: Hartono bunuh diri karena KKO diperkecil.<sup>6</sup> Ada yang menduga putus asa atas kegagalan tugasnya sebagai duta besar RI di Pyongyang, Korea Utara.

Tak semua orang percaya begitu saja. Beberapa perwira tinggi Angkatan Laut tak percaya. Ali Sadikin dan Rachmat Sungkar heran, karena mereka berdua tahu Hartono tidak divisum oleh dokter dari RSAL atau RS Cipto Mangunkusumo yang terkenal netral pada saat itu. Dua perwira tinggi Angkatan laut itu, tak percaya jika Hartono bunuh diri. Mereka, sebagai kawan dinas Hartono sangat paham, Hartono bukan tipe manusia yang mudah putus asa lalu bunuh diri hanya karena tugasnya gagal sebagai duta besar.

“Saya mendapat informasi, bahwa Hartono dibunuh, akibat terjadinya konspirasi tingkat tinggi.” kata Ali Sadikin. “...bukti yang ditemukan tidak mendukung motif untuk melakukan bunuh diri.”<sup>7</sup>

“Resume dari RSPAD (Gatot Subroto) hanya secara lisan mengatakan ayah saya sakit pendarahan otak. Surat kematian pun tak ada,” ingat Nenny Hartono putri bungsu Hartono dan Grace.<sup>8</sup>

Hartono sudah di Jakarta sejak Desember 1970.<sup>9</sup> Sebelum berangkat, Hartono dan Grace bertengkar. Grace tak rela Hartono ke Jakarta. Karena Grace berfirasat Hartono akan ditahan jika kembali ke Indonesia.<sup>10</sup>

5 *Pikiran Rakyat*, 9 Januari 1971.

6 Forum Silaturahmi Anak bangsa, *op. cit.*, hlm. 125: *Pembunuhan Letjen (KKO) Hartono* <http://petromaks.wordpress.com/2006/02/page/2/> Diakses 16 September 2007 pukul 16.40.

7 Wawancara Trans TV dalam program acara Lacak 2004.

8 Forum Silaturahmi Anak bangsa, *op. cit.*, 2013, hlm. 126.

9 *Pikiran Rakyat*, 9 Januari 1971.

10 *Pikiran Rakyat*, 12 Januari 1971.

Sebelum Hartono meninggal, pihak intelijen (Orde Baru) menyatakan Hartono terlibat G 30 S. Ketika pihak intelijen sedang menyusun laporan, Hartono dipanggil Sumitro sang Panglima Kopkamtib, kebetulan Hartono sedang berada di Jakarta. Belakangan, Sumitro mengaku: Hartono merasakan apa yang akan terjadi pada dirinya dengan pemanggilan itu.<sup>11</sup>

Orang tak dikenal mendatangi rumah Hartono subuh-subuh. Saat itu, Ibu Hartono yang kebetulan di rumah itu sedang salat subuh. Orang tak dikenal itu bertamu dan menghilang setelah suara tembakan. Hanya itu yang bisa dipercayai. Selebihnya misteri: siapa yang menembakkan pistol itu, juga siapa yang berkeinginan akan kematian Hartono.

Grace harus menjanda di usia 34 tahun dengan empat anak yang masih kecil-kecil.<sup>12</sup> Terpaksalah Grace sendirian membesarkan putri mereka. Hidupnya jelas susah secara sosial. Hartono bisa jadi dianggap terlibat G 30 S. Orang-orang di masa Orde Baru selalu alergi dan berusaha menjauh dari segala hal yang terkait G 30 S.

Grace masih cantik di tahun 1970an. Usianya masih kepala tiga. Bisa saja dia menikah lagi. Tapi dia tidak melakukannya. Hartono satu-satunya suaminya. Setelah Hartono tiada, Grace menyambung hidup keluarganya dengan bekerja di perusahaan terkemuka. Itu semua demi semua buah hatinya.

Bekerja bukan masalah bagi Grace. Meski dia pernah menjadi Nyonya Duta Besar, dia tidak kaget. Sedari muda, begitu lulus SMA dia sudah bekerja. Hidup terus berjalan. Grace harus berjuang puluhan tahun untuk membesarkan putri-putrinya sendirian. Meski terus dihantui misteri kematian Hartono, suaminya.

Dengan segala perjuangannya, Grace akhirnya bisa

---

11 Ramadhan K.H, *Soemitro: Mantan Pangkopkamtib: Dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkopkamtib*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 239.

12 Tempo, 6 Maret 1971, hlm. 11.



membesarkan anak-anaknya dan punya rumah yang nyaman di Pamulang menikmati sisa hidupnya bersama anak-anak dan cucunya.



Grace yang sedih dan di makam Hartono

Grace anak seorang dokter lulusan STOVIA yang pernah menjadi dokter di Puri Karangasem Bali. Namanya Engelbert Copero Walandauw. Ayah Grace meninggal waktu Grace masih sekolah. Ini alasan kenapa Grace tak bisa kuliah dan akhirnya memutuskan bekerja. Sedari lahir, Grace tinggal di Surabaya bersama ibunya yang lama menjanda setelah kepergian ayah Grace.

Grace lulusan SMA Santa Maria, Darmo, Surabaya. Sebagaimana anak muda, Grace tidak ketinggalan dalam pergaulan. Masa mudanya seperti anak muda umumnya. Grace juga hadir jika ada undangan pesta. Ini bukan berarti Grace orang yang suka pesta pora. Pesta tidak mungkin tiap hari, hanya di hari-hari tertentu. Berpesta tak sekedar bersenang-senang, tapi lebih kepada mempererat persahabatan.

Suatu kali, sebagai anak muda, Grace kebagian tugas menjadi penerima dalam sebuah pesta. Grace mengurus buku tamu bersama kawan-kawannya. Ketika itulah seorang laki-laki berkumis tipis datang bersama kawan-kawannya. Si laki-laki berkumis itu bertanya pada kawan-kawannya.

“Itu, siapa itu, kok anak Indo?” tanya Hartono agak heboh melihat Grace.

“Bukan! Itu Manado,” balas kawannya.

Ternyata, laki-laki berkumis itu kapten KKO. Grace sudah terbiasa bertemu dengan anggota, karena banyak kenalan KKO. Saudara sepupunya, Engelbert William Antonius Pangalila anggota KKO juga.

Pelan-pelan Grace pun pacaran dengan Hartono. Sekian lama pacaran, Hartono pun mengajak Grace menikah. Grace tentu ingin tahu alasannya: “Kenapa?”<sup>13</sup>

“Ya hanya lihat *personality* Grace saja.” jawab Kapten Hartono.

Akhirnya mereka tukar cincin. Grace tak punya orang tua lagi menjelang pernikahannya. Keluarga Grace hanya tinggal seorang kakak saja. Hartono menikahi Grace sekitar September 1958. Usia Hartono, sekitar 31 tahun tercatat beragama Islam. Sementara istrinya, Grace Barbara Walandau masih 22 tahun tercatat beragama Kristen Protestan.

Kala itu tak ada paksaan menikah harus satu agama. Mereka menikah di Solo. Mereka berdua bertemu di Surabaya. Ketika itu Hartono dinas di Surabaya.

Bagi Grace, Hartono tak hanya laki-laki baik-baik. Sejatinya dia memang orang baik. Grace suka pada kumis Hartono yang kala itu masih tipis. Usianya sudah menginjak 32 tahun. Pangkatnya baru Kapten KKO kala itu. Mereka menikah di rumah orangtua Hartono di Solo. Tak ada halangan. Meski berbeda agama dan budaya, orangtua

---

13 Wawancara Grace Walandauw (Pamulang, 16 November 2014)

Hartono merestui. Mereka menikah secara Islam. Awalnya, keluarga Hartono di kampung terkejut.

“Agak kaget, kok bukan orang Solo pacarnya? Kok lain. Kalau dari Manado itu kayak apa? Pertama memang agak kaget mereka. Kok pacaran bukan dapat orang Solo? Biasa di situ Solo dapat orang Solo,” kata Grace.

Setelah menikah, mereka tinggal di Surabaya. Mereka tak langsung dapat rumah. Mereka tinggal di luar asrama tentara. Grace pun tetap kerja. Ketika Hartono berpangkat Mayor, mereka tetap di Surabaya. Ketika masuk staf Angkatan Laut, barulah Hartono pindah ke Jakarta. Mereka pernah tinggal di bekas rumah dinas yang sebelumnya ditempati Ali Sadikin.<sup>14</sup> Mereka juga pernah tinggal di Jalan Prof Supomo nomor 44, Tebet, Jakarta.

Perkawinan Grace dan Hartono diberkahi empat orang putri: Tjahayani Chandra yang disapa Chandra, Dewati Chandra disapa Inge, Wahyuni Chandra disapa Nenny, dan Nurani Chandra yang disapa Inung. Putri bungsu mereka sudah tiada karena kecelakaan lalu lintas sekitar 2010. Nama-nama putri Grace dan Hartono ada pengaruh Jawa dan Sansekerta. Hartono ayah yang baik bagi anak-anaknya. Tak ada yang aneh dari Hartono sebagai ayah. Seperti ayah pada umumnya. Dalam ingatan Nenny Hartono, tak ada warna yang istimewa. Hartono sering memakai seragam KKOnya. Ayahnya adalah orang yang menghargai siapapun. Hal ini berusaha ditanamkan pada anak-anaknya yang kala itu masih kecil-kecil. Hartono biasa masuk kantor pukul 07.00 pagi, seperti juga prajurit lain.

Hidup Hartono tak jauh dari air. Sebagai KKO atau Marinir, melihat air sudah tiap hari. Bertempur di pantai sudah jadi takdir Marinir. Hobby Hartono pun tak jauh dari air. Hartono suka memancing. Sebuah hobby yang butuh dan melatih kesabaran, selain kesigapan. Hartono terlihat sebagai orang yang tenang. Jika libur, Hartono suka mengajak istri dan anak-anak rekreasi. Anak-anak

---

14 Tempo, 6 Maret 1971, hlm. 11.

Hartono masih kecil-kecil ketika dirinya menjadi orang nomor satu di Marinir atau KKO. Nenny Hartono menulis: “waktu kecil ya paling ngajak jalan-jalan ke Puncak atau makan bakso di pinggir jalan. Ya tahun itu hiburannya hanya seperti itu, tidak seperti sekarang.”<sup>15</sup> Kenangan tentang Hartono jelas terekam dalam kenangan putri-putrinya.



Grace dan Hartono, ketika Hartono belum jadi Panglima

“Perjuangan selanjutnya bagi kami yang ditinggal keluarga secara misterius ini adalah bertahan hidup. Rumah dinas diminta oleh negara dan kami menempati rumah kecil di pojok Pamulang,” kata Nenny Hartono.<sup>16</sup> Rumah yang ditempati Grace dan keluarganya itu adalah bantuan TNI Angkatan Laut. Grace dan putri-putrinya menikmati rumah itu dengan penuh rasa syukur. Mereka berusaha membuat rumah itu teduh.<sup>17</sup>

15 Wawancara dengan Nenny Hartono, 18 September 2013.

16 Forum Silaturahmi Anak Bangsa, *op. cit.*, hlm. 126.

17 Wawancara Nenny Hartono, 24 Juli 2015.

Salah seorang putri Grace yang sudah meninggal pernah menjadi dosen UI.<sup>18</sup> Grace dan anaknya, adalah orang-orang yang religius yang toleran pada perbedaan agama. Di rumah mereka di Pamulang yang sederhana dan sejuk, mereka mengoleksi banyak buku, karena mereka memang suka membaca.

Nenny belakangan aktif dalam rekonsiliasi nasional bersama Forum Silaturahmi Anak Bangsa. Di sana, anak-anak pelaku sejarah yang dulu bertikai berkumpul untuk memutus rantai permusuhan dan kekerasan. Mereka pernah menerbitkan buku: *Children of War*. Di forum ini, Nenny tertarik karena bertemu dengan anak-anak korban konflik membuat mereka saling kenal dan saling tahu jalan hidup masing-masing. Tidak disangka tidak dinyana, justru disini mereka dapat mengemukakan isi hati dengan bebas dan terbuka tanpa takut lagi. Kata Nenny: Tadinya, kami terpencair-pencar dan mungkin saling mencurigai, merasa paling benar sendiri, sekarang tidak lagi. Kami saling berempati satu sama lain bahkan tolong menolong dalam banyak hal.<sup>19</sup>

Ada sejarawan yang menyebut Hartono sebagai *The Man Who Never Was*. Dia dimakamkan di Kalibata yang prestisius di mata pejabat Indonesia, namun dia berusaha dilupakan. Semua data tentang dirinya berusaha dihapus. Setelah sekian tahun terlupakan, orang-orang mulai mengingat Hartono lagi. Korps Marinir tak melupakannya. Para prajurit Marinir ingat, pernah ada prajurit perwira Marinir bernama Hartono. Pada 8 Februari 2008, Grace diundang Korps Marinir untuk menghadiri pergantian nama Ksatriaan Marinir Cilandak menjadi Ksatriaan Marinir Hartono. Korps Marinir ingin mengenang Hartono, meski mereka enggan bicara soal kematian Hartono. “Hartono, sejak hari ini, meski terlambat hampir tigapuluh tahun, kehormatanmu telah dipulihkan,” kata Grace dalam hati. Salah cucu Grace bangga pada Hartono. Alessandro, nama cucu itu, setiap diajak ke makam Hartono memeluk nisan. Dengan

18 Wawancara Nenny Hartono (Pamulang, 16 November 2014)

19 Forum Silaturahmi Anak Bangsa, *op. cit.*, hlm. 125-126..

lugunya berkata: “Opa sepuh, kalau nanti sudah besar, aku harus jadi Marinir, menegakkan kebenaran dan keadilan.”<sup>20</sup>



Ksatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan.

---

<sup>20</sup> Julius Pour, *G 30 S: Fakta dan Rekayasa*, Jakarta, Kata, 2013, hlm. 636-639.

## Pelaut Gerilya di Darat

SOLO sebuah kota yang tenang. Bagi sebagian orang, selain Jogja, di pesisir selatan Jawa Tengah, Solo pun kota budaya, dimana kebudayaan Jawa bersumber dari sana. Ada dua kraton sisa-sisa kejayaan Kerajaan Mataram berada di sekitar kota Solo: Kesunanan Surakarta dan Kadipaten Pakualaman.

Banyak orang terkenal berasal dari Solo. Dalam dunia militer, orang Indonesia kenal Slamet Riyadi. Slamet Riyadi pun orang Solo juga. Sejak awal revolusi, Slamet Riyadi terkenal berani karena menerobos markas Kenpeitai yang kejam. Karena itu dirinya dihormati sebagai komandan di masa revolusi. Dan semasa menumpas RMS pun, Slamet Riyadi gugur sebagai pemberani. Dia ditembak *sniper* ketika memasuki kota Ambon. Solo bukanlah daerah di maritim. Yang sudah pasti adalah Suyoto (teman masa kecil Hartinah Suharto, yang akhirnya mengikuti jejak Slamet Riyadi di AD). Beberapa kawan lainnya bisa jadi adalah Hartono (kelak menjabat Panglima KKO), Saminu (kelak menjabat Komandan Batalyon II Tjakrabirawa, dari KKO AL), dan Pramuko Sudarmo (kelak menjabat Komandan Kesatrian KKO Gunung Sahari). Dia dituduh sebagai bagian dari Biro Khusus PKI dan akhirnya harus menjalani masa pembuangan di Pulau Buru bersama orang-orang lain yang dituduh komunis.<sup>21</sup>

Darah priyayi Solo masih menetes dalam darah Hartono. Ayahnya Prawirosumarto yang dari kalangan biasa adalah seorang guru. Sementara Ibunda Hartono masih keturunan Kraton Mangkunegaran.<sup>22</sup> Keluarga Hartono berasal dari Margorejo, tak jauh di sisi selatan Stasiun Solo-Balapan. Hartono lahir di Solo,

21 Alexander Arief, *Wong Solo dalam Pusaran G 30 S*, [www.wong-sangar.blogspot.com](http://www.wong-sangar.blogspot.com), Diakses 29 September 2013.

22 Wawancara Grace Walandauw (Pamulang, 16 November 2014)

1 Oktober 1927. Hartono adalah nama yang umum dipakai oleh orang-orang Jawa. Meski priyayi, keluarga Hartono juga tergolong keluarga petani.<sup>23</sup> Keluarga ini memiliki sawah yang mencukupi kebutuhan makanan mereka. Sawah itu biasanya digarap petani penggarap.

Beruntunglah dirinya bisa menikmati sekolah dasar untuk anak pribumi, yaitu *Hollandsche Inlandsch School* (HIS) hingga lulus. Sekolah adalah hal yang memungkinkan bagi anak-anak priyayi. Setelah itu, Hartono sempat belajar di sekolah menengah (waktu itu bernama MULO). Bisa sekolah di HIS dan MULO adalah keberuntungan.

Sayangnya, keberuntungan tak sempurna. Hartono tak bisa menamatkan MULO karena Balatentara Jepang keburu menduduki Hindia Belanda (Indonesia). Tak ada pilihan bagi anak MULO yang ingin lanjut ke sekolah untuk masuk SMP. Ada yang menyebut Hartono pernah belajar di STM.<sup>24</sup>

Pemerintah Militer Jepang membuka sekolah pelayaran. Nampaknya, Jepang bermaksud menambah pelaut pribumi untuk berbagai keperluan, termasuk urusan militer. Masa-masa pendudukan militer Jepang adalah masa-masa penuh ketidakpastian. Hartono pun ikut masuk ke sana. Hartono masuk di sekolah pelayaran di Tegal.<sup>25</sup> Belakangan, Tegal dikenal sebagai kota bahari. Tak heran jika ada sekolah pelayaran disana. Banyak pemuda jebolan SMP bergabung ke sekolah macam itu. Sekolah macam ini sedianya hanya menghasilkan pelaut. Di zaman *noormal* (masa damai), Hartono mungkin tidak disarankan jadi pelaut. Karena dengan MULO saja dia bisa jadi juru tulis di perusahaan swasta atau jika mau hidup jadi orang terpandang dia bisa masuk OSVIA—untuk jadi pangreh praja.

Tak lama setelah 17 Agustus 1945, Hartono sudah menjadi

---

23 Wawancara dengan Nenny Hartono, 18 September 2013.

24 Julius Pour, *G 30 S: Fakta dan Rekayasa*, op. cit., hlm. 632.

25 Wawancara dengan Nenny Hartono, 18 September 2013.



instruktur di sekolah pelayaran. Beberapa perwira *Corps Marinier* (cikal bakal Korps Marinir Indonesia/KKO) adalah instruktur sekolah pelayaran. R Suhadi, komandan pertama Marinir Indonesia adalah instruktur sekolah pelayaran di Semarang. Ali Sadikin, yang belakangan Letnan jenderal KKO yang kritis dan pernah jadi Gubernur Jakarta adalah instruktur sekolah pelayaran di Jakarta.<sup>26</sup>

Awalnya, pada September 1945, mereka mendirikan BKR laut di Tegal. Tak lama BKR laut berubah nama menjadi ALRI. Dan Tegal adalah Pangkalan IV ALRI. Bersama kawan-kawan di sekolah pelayaran: Mukijat; Chrismoy; Imam Sjafei, Jatidjan; Suwadji; Sudiarso; Suroto; Moch. Junus, Hartono ikut terlibat dalam menduduki gedung sekolah pelayaran dan galangan kapal di Tegal.<sup>27</sup> Beberapa pelatih Marinir pertama di Tegal itu antara lain: Sutarto, Sukemi, dan Tatang Rusmaja. Nama terakhir, Tatang Rusmaja, pernah jadi anggota PETA yang sudah belajar pertempuran di darat.<sup>28</sup> Mereka punya pengalaman sebagai militer dan pengetahuan militer sangat penting bagi pemuda yang bergejolak jiwa revolusinya.

Seperti pemuda lain, Hartono pun terseret arus revolusi Indonesia. Kebanyakan pemuda Indonesia akan pilih angkat senjata membela RI di tahun 1945. Nama Hartono tercatat sebagai Letnan ALRI dalam Corps Marinier (CM) di Pangkalan IV ALRI Tegal pada tanggal 15 November 1945. Jabatannya adalah wakil komandan Batalyon CM I Tegal.<sup>29</sup> Hal ini bukan tanpa sebab. Usianya baru 18 tahun. Orang muda yang jadi perwira biasanya orang dianggap terampil dan ahli dalam hal kelautan. Pengalaman sebagai siswa

---

26 *Korps Komando Angkatan Laut*, nomor 14, 15 Nopember 1963 (nomor istimewa hari ulang tahun ke XIII), hlm. 6-7: *Madjalah Djaja*, Pembangunan Ibukota Djakarta Raja, 1968, hlm. 4.

27 Sudono Jusuf, *Sedjarah Perkembangan Angkatan Laut*, Pusat sedjarah ABRI, 1971, hlm. 25.

28 *Korps Komando Angkatan Laut*, nomor 14, 15 Nopember 1963 (nomor istimewa hari ulang tahun ke XIII), hlm. 6-7.

29 *Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Periode Perang kemerdekaan 1945-1950)*, Dinas Penerangan TNI AL, 2005, hlm 213)

sekolah pelayaran bisa menjadi alasan mengapa Hartono jadi perwira dengan pangkat Letnan.

Hartono pernah juga menjadi komandan Batalyon 2 dengan pangkat Letnan Satu yang berkedudukan di Pasar Sore, Tegal. Selain bertugas di daerah Tegal, Hartono juga pernah bertugas di Pekalongan sebagai komandan Grup B yang kemudian digantikan Kapten Mukijat.<sup>30</sup> Kepangkatan sering berubah. Sering turun naik mengikuti peraturan pemerintah yang tak mampu menggaji tentara yang jumlahnya banyak.

Pangkalan IV Tegal memiliki persediaan seragam putih ALRI bagi personilnya. Dari pangkalan Tegal pernah dikirim seragam putih itu ke Kerawang. Pakaian itu terbuat dari kain blacu.<sup>31</sup> Meski Pangkalan IV Tegal memiliki persediaan macam itu, tetap saja tidak banyak pangkalan AL yang memilikinya. Pakaian tetap merupakan hal sulit di masa revolusi.

ALRI CM 1 Tegal kemungkinan beranggotakan para pemuda dari luar Tegal juga. Mungkin sulit menemukan banyak veteran-veteran laut berpengalaman. Kebanyakan veteran laut kemungkinan berada di kota pelabuhan, salah satunya adalah Surabaya yang bisa dipastikan pada 15 November 1945 sedang disibukan pertempuran 10 November 1945. Setelah November, pasukan Republik termasuk Angkatan Laut, ikut bergerilya di daratan. Selain tak memiliki armada laut yang cukup, pertempuran di darat lebih membutuhkan banyak tenaga manusia. Ratusan bahkan ribuan ALRI tak hanya bertempur di pantai tapi juga di pedalaman Jawa. Pasukan ALRI ini kemudian dimasukkan dalam Angkatan Darat.<sup>32</sup> Mereka sering dikenal sebagai julukan 'ALRI Gunung'.

Suatu pagi Hartono ikut terjebak di Kalibakung. Dia sedang

---

30 Sudono Jusuf, *op. cit.*, hlm. 71-73.

31 Junaedi dkk, *60 Tahun Pengabdian Korps Marinir*, Jakarta, Dinas Penerangan Korps Marinir, 2005, hlm. 196.

32 Radik Djarwadi, *Pradjurit Mengabdikan Gumpalan Perang Kemerdekaan Bataljon Y*, Jakarta, Pusat Sedjarah Militer, 1959, hlm. 173.

berada di rumah sakit darurat yang dibangun dr. Murad Kalibakung ketika Belanda sedang menyerang tempat itu. Bersama Letnan Purnomo, Letnan Hartono disuruh Dokter Murod berbaring dan diselimuti hingga mirip pasien. Senjata mereka berdua disembunyikan dibawah tempat tidur.<sup>33</sup>

CM sebenarnya saingan dari Korps Marinier Belanda yang banyak beroperasi di Jawa bagian timur. Marinir Belanda itu sebelumnya dilatih di Fort Quentico Amerika serikat. Senjata dan peralatan tempur mereka buatan Amerika, seperti juga yang dipakai Angkatan Darat dan Marinir Amerika Serikat. Sementara di front Jawa Tengah, CM tentunya akan lebih banyak berhadapan dengan KL atau KNIL (pasukan darat Belanda).

Semasa revolusi kemerdekaan Indonesia, pasukan Marinir Belanda alias *Korps Marinier*, pernah mendarat di Tuban lalu bergerak ke Bojonegoro, Kedung Banteng, lalu bergerak ke Madiun. Bersama pasukan KNIL yang berbasis di Malang, Marinir Belanda melakukan *mopping up*.<sup>34</sup>

Semasa revolusi kemerdekaan RI, *Corps Mariniers* banyak bertempur di daratan pulau Jawa. Bukan di pesisir, melainkan di daerah pedalaman Jawa Tengah seperti Temanggung. Pertempuran di pedalaman Jawa itu lebih disebabkan ruang gerak tentara Republik di pesisir utara Jawa terdesak oleh gerak maju pasukan militer Belanda.

Pertempuran di front Semarang dikenang oleh Korps Marinier dalam buku *60 Tahun: Pengabdian Korps Marinir*, tercatat sebagai pertempuran yang mereka lalui. Dalam bulan Maret 1946, Corps Mariniers mengemban tugas membendung penyusupan dan pendaratan gelap tentara Belanda—yang membonceng pada tentara sekutu yang menang perang. Dalam menghadapi masuknya

---

33 *Sedjarah kesehatan Angkatan Laut*, Jakarta, Angkatan Laut, 1980, hlm. 22.

34 Junaedi dkk, *op. cit.*, hlm. 560.

tentara Belanda di Semarang, Markas Pangkalan AL IV di Tegal telah mengirim 25 kali pasukan Corps Mariniers ke Semarang. Pasukan Corps Marinier juga ikut mempersempit gerak tentara Belanda disana.

Pasukan CM dibawah pimpinan Letnan Mukidjat mengalami pertempuran terbuka. Pasukan CM yang berada di kampung Mangkang itu diserang tentara Belanda dengan bantuan pesawat mustang P-51. Dari udara, pasukan CM ditembaki peluru mitraliur dan bom. Di darat sendiri, howitzer tentara belanda ikut menghantam kubu pertahanan pasukan CM. Karena kondisi tidak menguntungkan maka pasukan Letnan Mukidjat mundur. Ditempat lain, pasukan CM dibawah pimpinan Letnan Yunus melakukan penyerangan ke Lapangan Udara Kalibanteng, Semarang. Di sana terdapat pesawat militer Belanda beserta tangsi Angkatan Udaranya. Penyerangan ini cukup berhasil karena dua unit pesawat milik Militer Belanda itu berhasil dibakar. Tangsi militer AU Belanda itu sendiri rusak berat.<sup>35</sup>

Setelah Belanda pergi, seorang bekas Letnan marinier Belanda bergabung dengan Indonesia, Hunholz namanya. Hunholz kemudian terlibat dalam beberapa operasi militer di Indonesia. Tak banyak cerita tentang Hunholz.

Perkembangan Marinir alias KKO tergolong lamban pada tahun 1950an. Petinggi militer Indonesia belum banyak berpikir untuk memiliki dan mengembangkan pasukan komando. Hanya segelintir pejabat militer yang sadar. Di angkatan darat, ada Alex Evert Kawilarang yang pernah bertempur dengan pasukan khusus Belanda. Betapa kualitas pasukan khusus yang terlatih jauh lebih baik ketimbang pasukan reguler biasa. Alex Kawilarang membangun sendiri satuan khusus itu di bawah komandonya sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Satuan itu sempat bernama Korps Komando Angkatan Darat. Lalu berganti menjadi RPKAD.

Dimasa revolusi itu juga pasukan Corps Mariniers harus

---

35 *Ibid.*, hlm. 190.

berpisah sementara dengan Angkatan Laut. Angkatan Darat, dalam hal ini Divisi Diponegoro, membawahi pasukan Corps Mariniers yang sudah memiliki pengalaman pertempuran di darat. Pasukan Corps Mariniers ini dimasukkan dalam Resimen Samudra. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, di masa revolusi pernah meniadakan Tentara Laut atau Marinir pada tahun 1948. Hal ini dilakukan dalam rangka rasionalisasi dan reorganisasi tentara.<sup>36</sup>

Dalam buku *Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Periode Perang kemerdekaan 1945-1950)* tertulis bahwa ALRI melakukan perang gerilya ketimbang perang laut. Kondisi ini tidak berlangsung lama seiring berubahnya keadaan dan bergantinya Menteri Pertahanan sendiri.

Atas keterlibatan dalam revolusi Indonesia: Perang Kemerdekaan I dan II, Hartono mendapatkan Satyalencana Kemerdekaan I dan II.<sup>37</sup> Selain terlibat dalam perang kemerdekaan, Hartono juga ikut diterjunkan dalam pembersihan sisa-sisa gerakan Madiun 1948. Atas jasa itu pemerintah memberinya Satyalencana GOM I.<sup>38</sup> Konon, pengaruh peristiwa Madiun pun sampai Jawa Tengah. Ada pengikut gerakan kiri di kalangan milisi bersenjata.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm 184.

<sup>37</sup> Satyalencana Perang Kemerdekaan I: diberikan kepada anggota Angkatan Bersenjata yang mengikuti sepenuhnya Peristiwa Perang Kemerdekaan I dari tanggal 20 Juni 1947 sampai dengan 22 Februari 1948 kecuali dalam hal mereka tertawan, mendapat luka dan invalid (Pasal 18 ayat 1 UU nomor 70 tahun 1958). Satyalencana Perang Kemerdekaan II: diberikan kepada anggota Angkatan Bersenjata yang mengikuti sepenuhnya Peristiwa Perang Kemerdekaan II dari tanggal 18 Desember sampai dengan 27 Desember 1949 kecuali dalam hal mereka tertawan, mendapat luka dan invalid (Pasal 18 ayat 1 UU nomor 70 tahun 1958 Tentang Tanda-tanda Penghargaan untuk Anggota Angkatan Perang).

<sup>38</sup> GOM I diberikan Satyalencana Gerakan Operasi Militer I diberikan kepada anggota Angkatan Perang yang secara aktif mengikuti gerakan operasi Militer terhadap peristiwa Madiun yang terjadi pada tahun 1948. (Bab II Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1958 tentang Satyalencana Peristiwa Gerakan Operasi Militer.)

Mereka juga ikut dihabisi di Jawa Tengah, karena dianggap perembesan dari Madiun.



## Bintang Melesat

GERILYA selesai juga. KNIL dan KL sudah angkat kaki. Bahkan, Panglima tertinggi Tentara Belanda yang paling ambisius menyikat Republik, Letnan Jenderal Spoor, sudah mati kena serangan jantung. Kesepakatan dicapai. Setelah KMB, berbagai unsur ALRI yang tersebar di Jawa dan Sumatra seperti: Tegal, Pekalongan, Jakarta, Sibolga dan Sabang, diperintahkan untuk mengikuti seleksi di Pangkalan Utama Surabaya. Dari seleksi, 1.200 orang terpilih untuk disiapkan sebagai cikal-bakal pasukan Amfibi ALRI. Sekitar 95% dari peserta yang lulus berasal dari Corps Marinier atau Corps Armada IV Tegal—pimpinan Mayor Suhadi.<sup>39</sup>

Banyak pelaku sejarah sepakat bahwa cikal-bakal marinir Indonesia berasal dari Tegal dimasa Revolusi. Dan banyak yang membenarkan cikal bakal Marinir berasal darii CM Pangkalan IV Tegal karena personil awal KKO di tahun 1950, terdapat 90% mantan CA IV Tegal.<sup>40</sup>

Meski bagian dari Angkatan Laut, Marinir tentu berbeda dengan pelaut yang fungsinya mengurus navigasi dan teknis mesin perkapalan. Meski kadang pelaut juga harus bertempur di atas kapal—dengan senjata jarak jauhnya, Marinir lebih difungsikan untuk berperang. Karenanya, Marinir harus mengalami latihan militer yang berat seperti tentara darat juga. Di Sibolga, pasukan CM mendapatkan latihan kemiliteran seperti halnya tentara. Berbeda dengan personil pelaut yang dilatih oleh mantan Kaigun Heiho atau KM.<sup>41</sup>

---

39 *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid IX*, Jakarta, Cipta Adi Perkasa, 1990. hlm. 146.

40 *Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Periode Perang kemerdekaan 1945-1950)*, Dinas Penerangan TNI AL, 2005, hlm. 220.

41 *Ibid.*, hlm. 319.

Medio Juni 1950, dilakukan konsolidasi di Surabaya untuk seluruh anggota Corps Mariniers ALRI IV Tegal. Dalam sebuah Rapat diputuskan untuk menggunakan nama Korps Komando (KKO) AL. Seperti dalam Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. A/565/1948 pada tanggal 9 Oktober 1948, yang merubah nama Corps Mariniers menjadi Korps Komando Angkatan Laut. Selain itu direncanakan untuk mengadakan kursus tambahan bagi semua perwira, bintara, dan tamtama yang akan dilakukan di dalam dan luar negeri. Pusat Pendidikan KKO AL juga didirikan pada masa itu. Begitu juga dengan Pusat Pendidikan Amfibi di Surabaya. Persenjataan yang semula bervariasi lalu dilengkapi lagi dengan senjata jenis Johnson buatan FN Belgia. Untuk material tempur digunakan LVTP I dan LVTH, sedangkan sekoci pendaratan menggunakan LCVP dan LCM.<sup>42</sup>

Awalnya, KKO diniatkan sebagai Marinir seperti di Inggris, dan menjadi bagian dari Angkatan Laut. Belanda pun sebenarnya sama saja dengan Inggris. Jika di Amerika Serikat, Marinir terpisah dari Angkatan Laut. Bahkan menjadi angkatan tersendiri yang sering menjadi andalan untuk membuka jalan jika ada perang yang melibatkan Amerika.

November 1951, diadakan pertemuan antar perwira-perwira KKO di Wonokitri, Surabaya untuk membahas pembinaan dan hari depan KKO. Keputusan dari pertemuan adalah meningkatkan KKO sebagai pasukan pendarat Amfibi yang tangguh dan profesional. Prajurit KKO diharapkan memiliki kemahiran, keterampilan, dan pengetahuan sebagai pasukan tempur pendarat amfibi. Maka dimulailah sebuah latihan dan pendidikan pasukan marinir dengan bantuan misi militer Belanda dari Mariniers Corps Angkatan Laut Belanda. Cikal-bakal pasukan marinir itu dilatih untuk menguasai peralatan dan teknik gelar operasi amfibi mutakhir. Selain pelatihan di dalam negeri, beberapa perwira KKO dikirim ke luar negeri untuk berlatih—mereka ditempatkan belajar di korps Marinir Amerika

---

42 Junaedi dkk, *op. cit.*, hlm. 65 & 188-189.



Serikat dan Belanda.<sup>43</sup>

Alasan memilih Amerika Serikat adalah pertimbangan karena banyak anggota marinir Belanda semasa Perang Duna II yang dilatih di sana sebelum bertugas di Indonesia selama revolusi kemerdekaan RI. Belakangan, banyak anggota KKO justru dikirim ke Amerika, meskipun KKO adalah Marinir yang berada dibawah AL, bukan angkatan tersendiri seperti di Amerika.

Hartono lebih sering berada di kota Jakarta atau Surabaya. Dia sudah lebih dari lima tahun mengabdikan sebagai perwira KKO. Di tahun 1950an, Hartono sering terlibat dalam beberapa operasi militer. Tanda jasa atau bintang jasa, diberikan atas dasar jasa keterlibatan dalam sebuah pertempuran ataupun operasi militer. Tanda jasa tidak bisa sembarangan diberi. Tidak seperti ijazah yang bisa diberikan dengan asal ikut kursus saja.

Untuk satyalencana Gerakan Operasi Militer (GOM), haruslah terlibat dalam operasi militer, entah di garis belakang sebagai bantuan tempur atau logistik maupun di garis depan sebagai penggempur. Biasanya, para penerima satyalencana ini pernah terlibat dalam kurun waktu tertentu. Hartono adalah salah satu penerima Satya Lencana GOM I, IV, V, VII, VIII.

GOM IV "Satyalencana Gerakan Operasi Militer IV diberikan kepada anggota Angkatan Perang yang secara aktif sekurang-kurangnya 90 hari terus-menerus atau 180 hari terputus-putus dalam jangka waktu 2 tahun mengikuti gerakan operasi Militer terhadap Peristiwa Sulawesi Selatan yang terjadi sejak tanggal 10 Juni 1952 hingga waktu yang akan ditentukan oleh Menteri Pertahanan."<sup>44</sup>

Hartono ikut serta juga melawan pasukan DI/TII Jawa Barat yang dipimpin Kartosuwiryo. Dia mendapat Satyalencana GOM V untuk itu. "Satyalencana Gerakan Operasi Militer V diberikan

---

43 *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid IX, op. cit.*, hlm. 146-147.

44 Bab V Pasal 12, Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1958 tentang Satyalencana Peristiwa Gerakan Operasi Militer.

kepada anggota Angkatan Perang yang secara aktif sekurang-kurangnya 90 hari terus-menerus atau 180 hari terputus-putus dalam jangka waktu 2 tahun mengikuti gerakan operasi Militer terhadap peristiwa di Jawa Barat yang terjadi sejak tanggal 27 Desember 1949 hingga waktu yang akan ditentukan oleh Menteri Pertahanan.”<sup>45</sup> Belakangan, atas pengabdianya di KKO dia pernah mendapat Satyalencana Yudhatama KKO AL kelas I.<sup>46</sup>

Sebagai penerima satyalencana GOM VII, Hartono pernah dikirim melawan DI/TII di Aceh. “Satyalencana Gerakan Operasi Militer VII diberikan kepada anggota Angkatan Perang yang secara aktif sekurang-kurangnya 90 hari terus-menerus atau 180 hari terputus-putus dalam jangka waktu 2 tahun mengikuti gerakan operasi Militer terhadap peristiwa di Aceh yang terjadi sejak tanggal 20 September 1953 hingga waktu yang akan ditentukan oleh Menteri Pertahanan.”<sup>47</sup>

Dekade 1950an adalah dekade penuh pergolakan di Indonesia. Selain ada pergolakan daerah macam Darul Islam di Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, belakangan muncul juga PRRI/Permesta di Sumatra dan Sulawesi di tubuh Angkatan Laut. Selain pergolakan di atas, di beberapa wilayah masih ada gerombolan bersenjata yang sering merongrong rakyat sipil. Tahun-tahun 1950an adalah masa-masa yang tidak aman. Pergolakan tak hanya terjadi di daerah, namun juga di tubuh pemerintahan. Kabinet selalu berganti sejak 1950 hingga 1959. Akibatnya, program-program pemerintah sering berganti. Satu program belum selesai muncul program baru. Tidak ada perubahan berarti terhadap kesejahteraan rakyat.

Timbul diskriminasi di Angkatan Laut. Baik soal kedinasan, kepangkatan, maupun prioritas. Sejak masuknya bekas personil

---

45 Bab VI Pasal 16, Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1958 tentang Satyalencana Peristiwa Gerakan Operasi Militer.

46 Julius Pour, *G 30 S: Fakta dan Rekayasa*, op. cit., hlm. 632.

47 Bab VIII Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1958 tentang Satyalencana Peristiwa Gerakan Operasi Militer.

*Koninklijk Marine*, dengan kenaikan pangkat yang dua tingkat secara integral, dan adanya bekas pejuang AL yang harus keluar karena adanya demobilisasi maka bibit masalah pun muncul. Hingga masalah pun semakin kompleks. Pergolakan di tubuh AL meningkat sejak 1959, pasca penyelesaian gaya militer terhadap gerakan PRRI/Permesta di Sumatra dan Sulawesi.

Akhirnya muncul gerakan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel (Pelaut) Yos Sudarso dari korps pelaut dan Letnan Kolonel (KKO) Ali Sadikin dari KKO. Artinya dua unsur pasukan terdepan AL terwakili. Gerakan ini menuntut pergantian KSAL Laksamana Subiyakto. Atas tentangan kebijakannya di AL, maka Laksamana Subiyakto sendiri mengajukan pengunduran diri terhadap Presiden.

Ketika pelantikan anggota kabinet, sekelompok prajurit KKO, dibawah pimpinan Mayor Mukiyat, melakukan pawai melewati depan Istana Negara, Jakarta. Ini adalah bentuk *Show of Force* dari kelompok yang menentang pengangkatan kembali Laksamana Subiyakto. Nasution selaku menteri pertahanan dan keamanan menerima laporan bahwa, “mereka (pasukan KKO yang melakukan demonstrasi itu) mendapat kabar, Laksamana Subiyakto dilantik lagi menjadi KSAL.”<sup>48</sup>

Nasution dan jajarannya lalu melakukan perubahan kepemimpinan AL. Kolonel Martadinata lalu ditunjuk sebagai pengganti KSAL, menggantikan Subiyakto—mantan perwira AL Belanda—yang sudah sepuluh tahun menjadi KSAL. Pengangkatan Martadinata tidak mendapat banyak masalah karena Martadinata tidak dilibatkan dalam gerakan. Atas pembangkangannya terhadap atasan, Yos sudarso dan Ali Sadikin lalu mendapat hukuman skors dari Nasution. Keduanya menerima dengan penuh tanggung-jawab layaknya *gentleman*. Namun karena banyak simpati dari jajaran AL sendiri dan atas permintaan Martadinata—yang naik dua tingkat menjadi Laksamana, maka *scorsing* terhadap Ali Sadikin dan Yos

---

48 A.H Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas: Jilid 4 Masa Pancaroba Kedua*, Jakarta, Gunung Agung, 1984, hlm. 309.

Sudarso dipercepat. Mereka telah kembali lagi ke staf AL. Laksamana Martadinata begitu berharap keduanya membantunya memimpin AL. Presiden pun tidak berkeberatan atas permintaan Martadinata. Yos Sudarso lalu diangkat menjadi deputy II (Operasi) KSAL dan Ali Sadikin menjadi deputy III (Administrasi) KSAL.<sup>49</sup>

Akhir tahun 1950an, tak lama setelah operasi penumpasan PRRI/Permesta yang melibatkan banyak angkatan, Hartono ditempatkan di Surabaya. Surabaya salah satu pangkalan Marinir terbesar di Indonesia, selain Jakarta. Tak hanya Marinir, melainkan juga Angkatan Laut. Banyak instalasi dan satuan-satuan Angkatan laut di Surabaya.

Ketika itu pangkat Hartono masih Kapten. Pangkat ini biasanya memimpin sebuah kompi. Di masa lalu, seorang Kapten senior ada juga yang memimpin Batalyon. Jumlah Marinir tak sebanyak setelah tahun 1960an atau sebelum operasi Trikora. KKO lebih banyak dikerahkan dalam operasi Amphibi atau *raid* untuk menghalau pemberontakan yang marak di tahun 1950an.

Hartono ditempatkan di Surabaya dengan pangkat Kapten pada 1958. Kemungkinan besar, dia bukan Kapten yang baru diangkat, namun sudah beberapa tahun dengan pangkat itu. Setelah 1958 pangkatnya naik lagi. Mulai dari Mayor ke Letnan Kolonel, dari Letnan Kolonel ke Kolonel. Tak banyak catatan tentang kiprah Hartono sebelum dia menjadi Panglima tertinggi KKO.

---

49 *Ibid.*, hlm. 309-310.



Pelantikan Hartono sebagai Panglima KKO 8 November 1961



Penyerahan bendera dari R Suhadi kepada Hartono

Setelah kisruh di Angkatan Laut, Ali Sadikin dan Yos Sudarso diskors sementara. KKO akhirnya mengalami pergantian pimpinan. Saat Hari Ulang Tahun KKO ke-16, pada 15 November 1961. Usia Hartono ketika dilantik baru 34 tahun. Sebelum 1965, kebanyakan

posisi tinggi diisi oleh orang-orang muda karena tidak ada lagi orang yang lebih senior di zaman itu.

Hartono diangkat menjadi Panglima KKO. Masa-masa itu bukan masa tenang bagi Hartono. Selain pergolakan daerah yang masih tersisa, ada masalah besar yang mengharuskan KKO menjadi besar: perebutan Irian Barat. Butuh banyak pasukan pendarat (KKO) untuk merebut Papua. Jumlah pasukan diperbesar dan peralatan tempur juga ditambah. Hingga akhirnya KKO menjadi kuat di zamannya. Masa-masa Hartono menjadi panglima KKO adalah masa-masa genting dan penting dalam sejarah Indonesia. Konfrontasi Trikora ke Papua, Konfrontasi Dwikora menentang Malaysia dan G 30 S.

Tanggal 28 Desember 1963, Hartono berangkat ke Uni Sovyet dalam rangka tugas belajar selama 10 bulan. Sementara itu, tugas harian panglima dimandatkan kepada pejabat panglima KKO sementara ditunjuk Kolonel Herman Budoyo. Keberangkatan Hartono diantar oleh Laksamana Martadinata dan Ali Sadikin. Sebelum ditunjuk sebagai panglima, posisi Herman Budoyo adalah Kepala Staf KKO.<sup>50</sup> Hartono baru kembali ke Indonesia pada Desember 1964.<sup>51</sup> Namun serah terima atau pengembalian posisi panglima dari Herman Budiyo kepada Hartono terjadi pada 5 Januari 1965.<sup>52</sup>

Di masa-masa genting selama konfrontasi Dwikora, Hartono waspada pada bahaya pasukan asing yang sudah berada di sekitar Malaysia dan Singapura. Selaku panglima KKO yang setia pada Presiden Republik Indonesia, dalam perintahnya pada prajurit-prajurit KKO, Hartono berucap: “apapun yang terjadi KKO akan tetap berdiri di belakang Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, dan tetap loyal terhadap segala keputusan-keputusan yang telah diambil beliau.”<sup>53</sup>

---

50 *Korps Komando Angkatan Laut*, nomor 15, Desember 1963, hlm. 35.

51 *Korps Komando Angkatan Laut*, nomor 12, Desember 1964, hlm. 12.

52 *Korps Komando Angkatan Laut*, nomor 1, Januari 1965, hlm. 31.

53 *Korps Komando Angkatan Laut*, nomor 1, Januari 1965, hlm. 3.

Batalyon IV Korps Komando (Marinir) dari Angkatan Laut secara resmi dimasukkan dalam resimen Cakrabirawa pada 23 Februari 1963. Pasukan KKO yang dipimpin Mayor Saminu ini dimasukkan sebagai Batalyon II Cakrabirawa. Pasukan ini mungkin Batalyon II Kawal Kehormatan. Masuknya Batalyon IV KKO itu didasarkan pada Surat Keputusan Panglima Korps Komando Angkatan Laut No. 5401.2 tanggal 22 Februari 1963. Acara serah terima Batalyon itu ditandatangani oleh Kolonel KKO Herman Boedijo, Kepala Staf KKO dan Kolonel CPM Saboer Komandan Resimen Cakrabirawa—pangkat Saboer lalu dinaikkan satu tingkat menjadi Brigadir Jenderal. Dalam acara serah terima itu, secara simbolis, Mayor Saminu diganti baretnya oleh Brigadir Jenderal Saboer. Baret KKO, berwarna Ungu, ditanggalkan dan diganti dengan baret merah.<sup>54</sup>

Di tubuh Korps Marinir sendiri terdapat batalyon pengintai khusus. Pasukan ini memiliki kemampuan para atau *airborne* (mendarat dari udara). Batalyon Intai Amfibi di Marinir memiliki sejarah panjang. Didirikan pada 13 Maret 1961 berdasarkan surat Keputusan Dan KKO AL no 471KP/KKO/1961 tertanggal 13 Maret 1961 tentang pembentukan Kipam (Kompi Amfibi). Langkah ini lalu diperkuat dengan terbitnya Surat keputusan Dan Kormar no Skepl 122/IX/1993 tentang penetapan hari jadi Yontaiपुर pada 13 Maret 1961. Dari namanya, Kipam hanya memiliki personil dengan jumlah personil setingkat kompi saja.

Pasukan intai Amfibi yang baru berdiri setidaknya pernah terjun dalam konfrontasi Dwikora. Seperti dalam pencarian Letnan Sutanto, pada Oktober 1963, yang terpisah dari pasukan namun kemudian dinyatakan gugur. Selain itu, Kompi Intai Amfibi, yang bekerjasama dengan pasukan KKO yang lain juga mengadakan penyerbuan mendadak (*raid*) ke daerah Sabah pada Desember 1963. Dengan maksud mencari data-data intelijen dan menghancurkan posisi lawan. Mereka menyamar sebagai Tentara Nasional Kalimantan Utara. Pasukan Intai Amfibi itu belum lama dibentuk ketika mereka

54 *Tjakrabirawa* (Majalah Bulanan) no 5 edisi Juni 1963. hlm. 58-60.



diterjunkan ke perbatasan Malaysia di Kalimantan dalam operasi Dwikora. Kipam lalu dilibatkan lagi dalam pengambilan jenazah para perwira korban penculikan kelompok G 30 S di sebuah sumur tua desa Lubang Buaya, tidak jauh dari Pangkalan udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Pasukan Kipam itu bergerak cepat menuju lokasi dengan membawa peralatan yang diperlukan. Tugas ini berlangsung sukses dan mendapat bantuan dari pasukan TNI lain yang kebetulan berada di tempat itu.<sup>55</sup>

Masa krisis di Indonesia jelang tahun 1965, telah memberikan bukti tentang ketangguhan Hartono sebagai pejabat Angkatan Laut. Ulf Sandhausen menulis, “Hartono sebagai orang tangguh yang membantu Panglima AL Laksamana Mulyadi.”<sup>56</sup> Hartono, tentunya ikut pusing bagaimana menyiapkan pasukan KKO sebagai pasukan pendarat dalam operasi trikora pembebasan Irian Barat; lalu pasukan penyusup untuk konfrontasi melawan Malaysia.

Masa-masa Hartono menjadi Panglima itu adalah masa-masa dimana Sukarno “memanjakan” Angkatan Laut dan Udara dengan memberikan peralatan-peralatan militer. KKO mendapat banyak kendaraan pendarat lapis baja buatan Negara-negara Blok Timur. Senjata KKO adalah AK-47 yang dirancang Uni Sovyet dan diproduksi oleh beberapa negara komunis.

Di tengah situasi pertengahan dekade 1960an yang tidak menyenangkan itu, Hartono terus menjaga KKO. Ada kecelakaan pesawat yang menyebabkan salah seorang perwira KKO jadi korban juga. Pesawat Garuda Electra GIA Candi Borobudur mengalami kecelakaan pada 16 Februari 1967 di Manado. Mayor Engelbert William Antonius Pangalila meninggal pada kecelakaan itu. EWA Pangalila, yang masih saudara sepupu Grace Walandauw itu, bertugas ke Manado dalam rangka Civic Mission KKO AL.

---

55 Junaedi dkk, *op. cit.*, hlm. 246-247 & 259.

56 Ulf Sandhausen, *Politik MIliter Indonesia: Menuju Dwifungsi ABRI*, Jakarta, LP3ES, 1988, hlm. 401.

EWA Pangalila sebenarnya sudah melompat dari pintu pesawat, namun karena ada teriakan dari dalam pesawat, dia masuk lagi untuk menyelamatkan penumpang lain. Nasib berkata lain, EWA Pangalila, termasuk iparnya yang juga penumpang Garuda naas itu pun meninggal. Atas keberaniannya itu, melalui Surat Keputusan Panglima Korps Komando Angkatan Laut tanggal 26 April 1967, nomor: 11101, Hartono, memberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada Engelbert William Antonius Pangalila<sup>57</sup>

Hartono cukup kenal EWA Pangalila karena hubungan saudara sepupu dengan Grace. Hartono tentu tahu kehebatan EWA Pangalila. Dalam keluarga besarnya, EWA Pangalila biasa disapa Bert. Hartono yang bertubuh gemuk pernah diajak EWA Pangalila untuk terjun payung bersama. EWA Pangalila memang terbiasa terjun. Hartono hanya menjawab: “Bert, ini perut sudah buncit.”<sup>58</sup>

EWA Pangalila adalah lulusan Akademi Angkatan Laut V dengan peringkat pertama. Operasi pertamanya sebagai KKO adalah penumpasan PRRI/Permesta. Dia pernah terlibat dalam operasi Alugoro, operasi penumpasan Darul Islam di Aceh dan Jawa Barat. Dia pernah ikut latihan para komando di Batujajar tahun 1960. Tahun 1962, dia lulus *Advance Course US Marine Corps* di Amerika. EWA Pangalila salah satu pelopor pendirian Sekolah Perang Khusus KKO di Ksatria Gunungsari Surabaya dengan lokasi latihan di Baluran, Pantai Menang Banyuwangi.<sup>59</sup> EWA Pangalila adalah sosok perwira KKO ideal. Jika masih hidup dan berdinasti di KKO, dia berpotensi untuk menjadi perwira tinggi KKO, bahkan Panglima KKO.

---

57 *In Memoriam: Letkol KKO EWA Pangalila*, [http://garudamilitar.blogspot.com/2013/02/kami-bukanlah-pahlawan-tapi-kenanglah\\_21.html](http://garudamilitar.blogspot.com/2013/02/kami-bukanlah-pahlawan-tapi-kenanglah_21.html)

58 Wawancara Grace Walandauw (Pamulang, 16 November 2014)

59 *In Memoriam: Letkol KKO EWA Pangalila*, [http://garudamilitar.blogspot.com/2013/02/kami-bukanlah-pahlawan-tapi-kenanglah\\_21.html](http://garudamilitar.blogspot.com/2013/02/kami-bukanlah-pahlawan-tapi-kenanglah_21.html)



Potret Letkol EWA Pangalila

## Hitam Kata Bung Karno Hitam Kata KKO

OKTOBER 1965 adalah bulan-bulan menegangkan. Tanggal 1 Oktober 1965 adalah ulang tahun Hartono ke 38. Kado ulang tahunnya adalah menjalani masa-masa berat setelah diculiknya perwira-perwira tinggi Angkatan Darat semalam sebelumnya. Para Jenderal itu diculik dari rumahnya masing-masing. Selama beberapa hari mereka dinyatakan hilang. Tanggal 1 Oktober 1965, tersiar dari Radio Republik Indonesia tentang susunan Dewan Revolusi oleh Kolonel Untung. Suasana jadi makin membingungkan.

“Demi keselamatan Negara Republik Indonesia, demi pengamanan pelaksanaan Pantja Sila dan Panitia Azimat Revolusi seluruhnya, demi keselamatan Angkatan Darat dan Angkatan Bersenjata pada umumnya, pada waktu tengah malam hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Ibukota Republik Indonesia Djakarta, telah dilangsungkan gerakan pembersihan terhadap anggota-anggota apa jang menamakan dirinya “Dewan Djenderal” jang telah merentjanakan coup mendjelang Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965.” (Dekrit No 1 tentang Pembentukan Dewan Revolusi).

Beberapa waktu sebelumnya sudah beredar isu tentang Dewan Djenderal—sekelompok Jenderal yang tidak loyal pada Sukarno dan hendak melakukan penggulingan kekuasaan. Rupanya sudah ada kelompok yang menyikapi desas-desus Dewan Djenderal itu, yakni kelompok pimpinan Letkol Untung dengan Gerakan 30 September yang dipimpinnya. Untung adalah salah satu Komandan Batalyon Cakrabirawa. Kelompoknya dianggap sangat loyal pada Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Sementara itu, Batalyon Kawal Kehormatan II cakrabirawa dari KKO, 1 Oktober berada di

sekitar Tugu Tani dan Prapatan.<sup>60</sup>

Dalam siaran itu, diumumkan pula para anggota Dewan Revolusi. Kebanyakan anggotanya adalah orang-orang yang juga terkenal loyal pada Bung Karno. Nama Hartono masuk duduk sebagai anggota Dewan Revolusi. Hartono tak tahu menahu soal mengapa namanya masuk dalam susunan Dewan Revolusi itu. Kebanyakan orang yang masuk dalam daftar anggota Dewan Revolusi itu sejatinya tak tahu-menahu mengapa dirinya masuk dalam daftar. Hanya saja, beberapa nama terkenal yang masuk dalam daftar anggota Dewan Revolusi itu adalah orang-orang yang loyal pada Pemimpin Besar Revolusi/Presiden Republik Indonesia, Sukarno.

Tanggal 2 Oktober 1965, Angkatan Laut mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Angkatan Laut tidak menyetujui dan tidak membenarkan Gerakan 30 September, juga Menteri/Panglima Angkatan Laut beserta Panglima KKO tidak tahu menahu, apalagi terlibat, dalam G 30 S.<sup>61</sup>

Pada 3 Oktober, ketika akan mengangkat Jenazah korban G 30 S, Hartono yang sedang di rumahnya di Menteng didatangi Kapten Zeni Sukendar dan Letnan Mispam Sutanto, yang ingin meminjam alat selam. Selaku Panglima KKO dengan pangkat Brigjen, Hartono mengizinkan alat selam KKO dipinjam oleh Kostrad, padahal surat peminjaman resmi dari Kostrad belum ada. Dengan izin Hartono, alat selam yang ada di KRI Multatuli bisa dibawa.<sup>62</sup>

Dalam perintahnya kepada prajurit KKO pada Hari Ulang Tahun KKO ke XXII, Hartono memerintahkan untuk meningkatkan kewaspadaan di setiap sleg orde KKO AL di seluruh Indonesia untuk tidak terjebak pada intrik-intrik dan adu domba yang dilancarkan

---

60 Hendro Subroto, *Sintong Panjaitaan: Perjalanan Seorang Prajurit Parakomando*, Jakarta, Kompas, 2009, hlm. 122

61 Rosihan Anwar, *Sukarno, PKI dan Tentara*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2009, hlm. 379

62 Hendro Subroto, *op. cit.*, hlm. 134; Julius Pour, *G 30 S: Fakta dan Rekayasa, op. cit.*, hlm. 633.

oleh sisa-sisa G 30 S Orde Lama dan dan kaum subversi asing. Dan juga mengikis habis sisa-sisa G 30 S/PKI dan Orde Lama.<sup>63</sup>



Bersama Panglima Angkatan Laut Laksamana Muljadi

Ketika Sukarno mendengar berita akan ada penyerangan ke istana oleh RPKAD, Sukarno langsung menghubungi Hartono. Tujuan Sukarno tidak lain meminta jaminan ulang atas dukungan KKO—dengan kata lain Sukarno mempertanyakan apakah KKO siap berhadapan dengan RPKAD yang akan mengepung istana Sukarno. Hartono masih konsisten pada ucapannya untuk mendukung Sukarno, walaupun posisi Sukarno sedang berada diujung tanduk.<sup>64</sup>

Tanggal 10 Maret 1966, sekitar pukul 12.00 sampai 14.00 Presiden bersama Soebandrio, Leimena dan Chaerul Saleh sengaja menemui Mayor Jenderal Hartono, Panglima KKO di Markas KKO Cilandak, pinggir selatan Jakarta. Presiden

---

<sup>63</sup> Korps Komando Angkatan Laut, Nopember 1965, hlm. 1.

<sup>64</sup> Berdasar laporan dari Brigadir Jenderal Suadi yang baru pulang dari pos-nya sebagai Duta Besar di Ethiopia (Harold Crouch, *Army and Politics In Indonesia*, ab. T.H. Sumarthana, *Militer & Politik Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1999. hlm. 208).

menanyakan apakah KKO sanggup menghadapi RPKAD, yang menurut info intelijen akan menyerbu istana?. Mayor Jenderal Hartono menjawab, “sanggup”. Begitu juga atas pertanyaan Presiden, Hartono menjawab, KKO sanggup melindungi Bung Karno. Maka sejak itu, seluruh KKO diperintahkan untuk mempersiapkan diri. Jenderal Hartono termasuk seorang panglima yang diandalkan Bung Karno. Sebenarnya, dia malahan sudah akan diangkat menjadi Panglima Angkatan Laut, untuk menggantikan Laksamana Martadinata. Tapi mengingat jabatan tersebut khusus untuk posisi perwira korps pelaut, maka akhirnya Muljadi yang diangkat dan Hartono ditetapkan sebagai Wakil Panglima Angkatan Laut, dengan tetap merangkap jabatan Panglima KKO.<sup>65</sup>

Namun, Mangil ajudan utama dan terlama Sukarno, membantah pernyataan bahwa Sukarno minta perlindungan kepada Hartono, karena hal itu terkesan berlebihan. Apalagi jika pertemuan itu terjadi pada siang hari. Menurut Mangil itu sangat mencolok sekali. Mangil hanya bisa memastikan jika malam tanggal 10 Maret 1966, seluruh kekuatan KKO bersiap. Rombongan Presiden berencana ke Istana Bogor, mereka hanya singgah ke markas KKO Cilandak. Di antara anggota Cakrabirawa, pengawal Sukarno memang berasal dari KKO. Mangil tak menyebut ada Hartono di Markas KKO Cilandak. Hanya ada para perwira dan prajurit yang berjaga malam itu.<sup>66</sup> Hartono tidak tinggal di Cilandak. Soal tuduhan Nasution pada Bung Karno dan Hartono sekaligus, Mangil mengaku:

“Dan kalau benar di tengah malam Panglima Tertinggi sampai *ngemis* istiahnya, memohon perlindungan KKO dan langsung

---

65 Abdul Haris Nasution, *Masa Kebangkitan Orde Baru* (jilid VI), Jakarta, CV Haji Masagung, 1986, hlm. 386; Julius Pour, *G 30 S: Fakta dan Rekayasa*, Jakarta, Kata, 2013 hlm. 292-293.

66 Julius Pour & Mangil Martowidjojo, *Kesaksian Tentang Bung Karno*, Jakarta, Grasindo, 2001, hlm. 417-421.

kepada Panglimanya, *masak* dia rela Bapak meneruskan perjalanan ke Bogor sendirian? Dengan hanya tambahan pengawalan satu regu KKO? Pasti, malam itu juga seluruh kekuatan KKO akan langsung diperintahkan oleh Jenderal Hartono untuk menghalau para pengganggu.”Boleh saja Jenderal Nasution menuduh, tetapi harus masuk akal. Kalau tidak, apalagi istilahnya kalau bukan..fitnah.”<sup>67</sup>

KKO dibawah Hartono jelas setia pada Sukarno. Pada November 1965, setelah G 30 S dan Sukarno mulai digerogoti kekuasaannya oleh AD Suharto dan Nasution, Hartono mengucapkan “*Hitam kata Bung Karno, Hitam kata KKO; Putih Kata Bung Karno, putih kata KKO.*” Jika menyadari betapa kuatnya Suharto dan betapa lemahnya Sukarno, nampaknya mendukung Sukarno bukan hal mudah. Ada kemungkinan yang tidak kecil jika AD dibantu kekuatan dari luar semacam Amerika.

KKO adalah salah satu pendukung Sukarno melalui panglimanya, Hartono belum G 30 S—bukan berarti kedekatan ini adalah indikasi keterlibatan Hartono dan KKO dalam G 30 S. Ucapan Hartono yang paling diingat Suharto dan cukup menakutkan adalah “*Hitam kata Bung Karno, Hitam kata KKO; Putih Kata Bung Karno, putih kata KKO.*”

“Melihat situasi yang makin memburuk dan merendahkan martabat Kepala Negara, Brigadir Jenderal Hartono sebagai Panglima KKO Angkatan Laut yang menguasai pasukan yang cukup besar dan tangguh, mengharapkan komando dari Presiden/Panglima Tertinggi mengenai tindakan yang harus ditempuh untuk menjaga kehormatan dan Martabat Presiden/Panglima Tertinggi. KKO merasa dapa melindungi Bung Karno. “Merah kata Bung Karno, merah KKO. Hitam kata Bung Karno, maka KKO hitam” kata Hartono. Namun, Bung Karno tidak

---

<sup>67</sup> Julius Pour, *Gerakan 30 September ; Pelaku, Pahlawan & Petualang*, Jakarta, Kompas, 2010, hlm. 159.



mengeluarkan komando yang diharapkan. Akibatnya, setelah ditugaskan sebagai Duta Besar di Korea Utara, suatu hari dia mendapat panggilan dari Jakarta. Ternyata ia datang untuk menyerahkan nyawanya. Hartono dibunuh secara misterius dan bukannya bunuh diri seperti yang resmi diumumkan.”<sup>68</sup>

Hartono terus menjadi panglima tertinggi KKO. Pada 27 November 1966, Hartono ditunjuk sebagai Menteri/Deputi Panglima Angkatan Laut, namun masih merangkap Panglima KKO.<sup>69</sup> Sebagai deputi Menteri Angkatan Laut, Hartono menerima Bintang Jalasena kelas II.

Kondisi politik Indonesia terus memanas. Presiden Sukarno menjadi-kambing hitam atas segala masalah di Indonesia Banyak kelompok tak puas akan kepemimpinan Sukarno pasca G 30 S. Demonstrasi bermunculan. Mahasiswa UI yang belakangan dicap Ameriksentris oleh sebagian orang menjadi bagian terpenting kelompok yang belakangan disebut Angkatan 66, berjasa besar menjatuhkan Sukarno. Dimana Soe Hok Gie punya andil didalamnya. Segala kekuatan pro Sukarno kerap jadi sasaran kebencian. Hal ini begitu naas bagi anggota KKO yang sewaktu kejadian G 30 S sedang bertugas di perbatasan bertaruh nyawa dengan SAS Inggris.

Peristiwa G 30 S, hubungan mahasiswa dengan KKO AL berada dalam titik nadir. Tidak demikian dengan RPKAD yang dianggap sebagai kakak adik dalam gerakan menjatuhkan Orde Lama (baca Presiden Sukarno). KKO dianggap Sukarno is akibat pernyataan Komandan KKO Mayjen Hartono yang mengatakan, *“Hitam kata Bung Karno, Hitam kata KKO; Putih Kata Bung Karno, putih kata KKO.”* Akibatnya, prajurit-prajurit yang pulang dari medan laga Dwikora di perbatasan Kalimantan,

---

68 Maulwi Saetan, *Dari Revolusi 45 Sampai Kudeta 66: Kesaksian Wakil Komandan Tjkrabirawa*, hlm. 247.

69 Julius Pour, *G 30 S: Fakta dan Rekayasa*, Jakarta, Kata, 2013 hlm. 632.

mendapat sambutan dingin dari para mahasiswa, tidak sehangat ketika pasukan RPKAD kembali ke Jakarta dari Jawa tengah setelah menumpas sisa G 30 S. Mendapat perlakuan ini, tak mengherankan bila KKO merasa dianaktirikan, padahal mereka juga menyabung nyawa demi tegaknya Republik.<sup>70</sup>

Angkatan Darat dianggap pahlawan di zaman Orde Baru karena menumpas G 30 S. Padahal pelaku-pelaku G 30 S sejatinya berasal dari Angkatan Darat. Para pelaku, Letkol Untung dan pasukan penculik adalah prajurit Angkatan Darat yang begitu berjasa pada negara sebelum peristiwa. Mereka berasal dari Batalyon 454 Banteng Raider Diponegoro. Setelah Operasi Trikora yang gemilang, mereka adalah bagian dari Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad) pimpinan Mayor Jenderal Suharto. Pasukan Untung ini bahkan diberi kehormatan mengawal. Karena konflik internal G 30 S ini, di zaman Orde Baru (Suharto), Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang memang loyal pada Sukarno selalu dianaktirikan. Setidaknya, itulah yang mereka rasakan.<sup>71</sup>

Sekitar tahun 1967, pasca konfrontasi Malaysia diakhiri oleh Suharto selaku penguasa tertinggi Indonesia, banyak sisa gerilyawan bekas sukarealawan Dwikora di pedalaman Kalimantan menentang. Mereka lalu membuat gerakan: Pasukan Gerilya Rakyat Serawak (P.G.R.S.) dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PARAKU) atau PGRS PARAKU.

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dalam jangka waktu sejak tanggal 1 April 1967 sampai tanggal yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan/Keamanan secara aktif selama sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari melakukan tugas dalam gerakan pembersihan dan pemberantasan terhadap pemberontakan dan

---

<sup>70</sup> Rudi Badil, Luki Sutrisno Bakti, Nesy Luntungan, *Soe Hok Gie Sekali Lagi: Buku Pesta dan Cinta dalam Bangsaanya*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2009, hlm. 252-253.

<sup>71</sup> Bekas Marsekal Udara Cheppy Hakim merasa Angkatan Udara dianak-tirikan.

Gerombolan Cina Komunis (G.T.K.) yang merupakan gabungan antara Pasukan Gerilya Rakyat Serawak (P.G.R.S.) dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PARAKU) yang timbul di Kalimantan Barat, diberi Tanda Penghargaan berupa Satyalancana dengan nama Satyalancana “Dharma Phala”.<sup>72</sup> Operasi ini disebut GOM VIII melawan PARAKU di Kalimantan.

Pasca 1966 terjadi pembersihan besar-besaran oleh Suharto dengan memperlakuk Angkatan Darat terhadap orang-orang yang dianggap komunis. Sedikit saja seseorang berhubungan dengan komunis, nasib orang itu bisa sial di zaman Orde Baru. Tanpa peduli pangkat, jasa-jasa di masa lalu, siapapun yang baru dianggap terlibat saja bisa merasakan jadi tahanan. Dan dalam kondisi kacau nyawa yang orang yang baru dituduh tapi belum terbukti saja bisa melayang. Begitulah yang tidak tercatat dalam buku sejarah Indonesia. Orang-orang Indonesia dengan cepat melupakan pembantaian yang menghabiskan 3 juta jiwa, menurut Sarwo Edhi Wibowo—yang dianggap pemimpin pembantaian sendiri.

Sangat ironis jika KKO identik dengan komunis. KKO ikut menumpas PARAKU/PGRS, KKO juga ikut mengangkat jenazah para jenderal Angkatan Darat yang diculik dan dibunuh di Lubang Buaya ketika G 30 S. Setelah ada pengumuman Dewan Revolusi oleh Letkol Untung, Angkatan Laut, selaku induk KKO dan dengan didukung KKO, langsung mengklaim jika mereka tidak terlibat dan tidak tahu-menahu tentang G 30 S. Sangat aneh jika ada anggota KKO yang dianggap terlibat G 30 S. Tak ada anggota KKO yang ikut ke Lubang Buaya.

Di zaman Orde Baru, tak harus jadi komunis untuk dicap terlibat G 30 S. Seseorang yang mendukung Sukarno saja bisa kena tuduhan itu. Banyak pendukung Sukarno di militer. Namun, Angkatan Darat sudah dikuasai kelompok anti-Sukarno. Angkatan Laut, juga KKO, adalah korps yang paling menentang Orde Baru. Mereka berhasil

---

<sup>72</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1968 tentang Satyalancana Peristiwa Gerakan Operasi Militer VIII Dharma Phala

membebaskan diri dari pengaruh Orde Baru hingga tahun 1969. KKO sendiri ikut membantu penerbitan media dwi mingguan *El Bahar* yang kritis terhadap pemerintah orde yang baru. Komodor R.S Puguh, yang masih keponakan dari Presiden Sukarno, adalah pengasuhnya. Kantor redaksi *El Bahar* terletak di dalam kompleks KKO.

Meski KKO dan pendukung Sukarno di AL tidak tersentuh Orde Baru, namun sekutu-sekutu sipil anti Orde Baru terus disikat oleh pemerintah Orde Baru. Atas nasib sekutu-sekutunya itu KKO tidak bisa berbuat banyak, kecuali sekedar memaki-maki jenderal Orba.

M. Yasin pernah menerima pertentangan dari KKO. Sekelompok prajurit KKO yang benci padanya, kerap berkata “Jasin tahi”. Ini tentu sangat tidak menyenangkan bagi Yasin yang kala itu adalah Panglima KODAM Brawijaya. Yasin menemukan bahwa di Jawa timur, Orde Baru mendapat tentangan dari orang-orang pro Sukarno, termasuk di kalangan militer (khususnya KKO dan AL pada umumnya) dan kepolisian.

Berdasar informasi yang diperoleh, Jenderal M. Yasin yang menjabat Pangdam Brawijaya, Kapolda Sumarsono, yang masih kerabat Sukarno, mengadakan rapat. Kemudian Yasin dilaporkan bahwa ada rencana KKO untuk menculik Sukarno untuk dibawa ke Blitar Selatan. Sukarno kemudian dijadikan sebagai simbol perlawanan terhadap Orde Baru. Di mata Yasin, Sukarno adalah simbol perlawanan komunis PKI. Menurut Yasin, rapat orang kepolisian dan AL tidak terjadi karena rencana sudah bocor.<sup>73</sup>

Jawa Timur memanas karena AD berseteru dengan KKO. Yasin mengaku, “Pernah terjadi pada pertengahan tahun 1967. Saya dihina oleh pasukan KKO. Waktu itu beberapa truk membawa mayat seorang PNI-ASU dengan dikawal beberapa prajurit KKO melewati depan rumah saya. Mereka meneriakan yel-yel “Panglima Jenderal

---

73 Nurinwa Hendrowinoto (penyunting), *M. Yasin. Saya Tidak Pernah Minta Ampun Kepada Suharto (Sebuah Memoar)*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1998, hlm. 73.

Jasin Tahi! Panglima Jenderal Jasin Tahi!”. Saya mendengar teriakan tersebut, lalu keluar. Pasukan pengawal yang berusaha bertindak saya cegah. Komandan Korem saya, Acub Zainal mendengar berita itu juga sangat marah dan bisa menerima panglimanya dihina. Ia menghadapinya dengan berpijak pada sumpah prajurit. Saya mencegah tindakan Acub, dan saya katakan bahwa besok saya akan mengundang semua Panglima AL dan Panglima KKO yang ada di Surabaya.

Saya langsung mengambil kebijakan, pada pertemuan esoknya yang dihadiri oleh Panglima AL, Panglima Armada, Komandan AL dan KKO. Saya katakan bahwa kemarin telah terjadi penghinaan terhadap Panglima Brawijaya. Saya mengingatkan dengan keras kepada mereka, jika itu terjadi lagi semuanya akan saya serahkan pada Komandan Brigade dan Komandan Korem saya untuk bertindak, dan pasti akan terjadi perang saudara. Akhirnya mereka minta maaf dan tidak akan terulang lagi.

Ketika saya bermain golf di Gunung Sari yang letaknya dekat dengan Asrama KKO, saya selalu mendapat intimidasi dengan tembakan ke udara. Saya tetap tenang, tetapi didalam *golfbag* selalu tersedia *stengun* otomatis. Saya yakin tembakan itu hanya untuk menakut-nakuti saya. Panglima KKO Hartono yang saya lapori kejadian tersebut, rupanya membela anak-buahnya.

Dengan kejadian-kejadian diatas, saya segera melaporkan ke Markas Besar AL Jakarta menemui Letnan Jenderal KKO Hartono. Saya katakan bahwa jika KKO tetap bertahan dengan keyakinan mereka *“Jika Bung Karno Hitam maka KKO hitam dan jika Bung Karno Putih maka KKO putih”* akan terjadi perang saudara. Dulu KKO dekat dan akrab dengan dengan Bung Karno. Bahkan mereka pernah berencana membawa Bung Karno untuk dibawa ke Markas mereka di Cilandak. Belakangan diketahui bahwa banyak orang KKO terlibat dalam rencana tersebut.”<sup>74</sup>

---

74 *Ibid.*, hlm. 68-69.

Kemudian perang dingin AD dengan KKO di Jawa Timur mulai mereda setelah Yasin membuat kesepakatan dengan Panglima Daerah Maritim V Laksamana Suyatno untuk memenangkan Orde Baru dan menghantam segala kekuatan yang mengembalikan kekuasaan Sukarno. Setelah KKO AL di Surabaya diatasi AD maka organisasi pendukung Sukarno mulai dihantam di Surabaya.<sup>75</sup>

Angkatan Laut selaku golongan pendukung Sukarno akhirnya pelan-pelan dihabisi. Tahun 1968, Hartono selaku Komandan Jenderal KKO diberhentikan secara halus. Selanjutnya Hartono dijadikan duta besar di Pyongyang, Korea Utara. Tahun 1969, Laksamana Mulyadi selaku pimpinan tertinggi AL mengundurkan diri. Ketika itu bisa dibayangkan betapa tekanan terhadap AL oleh Orde Baru begitu besar. Mulyadi juga bernasib seperti Hartono, “didubeskan”. Mulyadi dijadikan duta besar di Moskow, Uni Soviet. Baik Uni Soviet maupun Korea Utara adalah Negara Sosialis.

Selain dua perwira tinggi tadi, masih ada Komodor RS Pugu, Laksamana Djatijan dan Komodor Syamsu mulai disingkirkan. Di masa-masa “pembersihan Jenderal” itu, otonomi KKO dikebiri. Struktur komando-nya berada dibawah komando panglima AL dan komando tertinggi AL berada dibawah Laksamana Sudomo. Sudomo dikenal sebagai kolega Jenderal Suharto, setidaknya sejak operasi pembebasan Mandala Trikora di Papua.<sup>76</sup>

Banyak cerita yang tidak menyenangkan yang harus disimpan korps ini. Di masa Sukarno, loyalitas korps ini begitu besar. Korps ini mungkin satu-satunya korps yang menolak keberadaan Orde Baru sebagai prajurit yang loyal kepada Pemimpin Besar revolusi. Sebaliknya Sukarno begitu berharap banyak dari KKO di akhir kekuasaannya. Ketika Sukarno mendengar berita akan ada penyeragaman ke istana oleh RPKAD—berdasar laporan dari Brigadir Jenderal Suadi yang baru pulang dari pos-nya sebagai Duta Besar di

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 69-70.

<sup>76</sup> Harold Crouch, *Army and Politics In Indonesia*, ab. T.H. Sumarthana, *Militer & Politik Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1999. hlm., hlm.267.

Ethiopia—Sukarno langsung menghubungi Hartono. Tujuan Sukarno tidak lain meminta jaminan ulang atas dukungan KKO—dengan kata lain Sukarno mempertanyakan apakah KKO siap berhadapan dengan RPKAD yang akan mengepung istana Sukarno. Hartono masih konsisten pada ucapannya untuk mendukung Sukarno, walaupun posisi Sukarno sedang berada diujung tanduk.<sup>77</sup>

Di awal kekuasaan Orde Baru, KKO adalah korps elit anti Orde Baru yang tersisa. Ketika pendukung Sukarno—yang tidak jarang dicap juga sebagai pendukung G 30 S—lainnya melemah, KKO terus melawan dan masih menganggap Sukarno masih presiden mereka. Suharto dengan kekuatan Angkatan Darat yang digenggamnya berusaha melakukan pembersihan unsur-unsur anti Orde Baru di berbagai kesatuan militer. Laksamana (Laut) Muljadi tidak mau memenuhi tuntutan AD dan Suharto. Belakangan Panglima AL ini digeser dan bukan tidak mungkin dicap sebagai pendukung dalam sejarah Orde Baru.<sup>78</sup>

Bulan Juni 1967, terjadi baku tembak antara KKO dengan anggota AD—yang pastinya pro-Suharto dan Orde Baru—di Probolinggo. Ketika RPKAD dari Jakarta melakukan operasi di Jawa Timur—yang menjadi basis KKO—beberapa anggota KKO terluka di Wonokromo akibat ledakan granat. Sementara di Jombang terdengar beberapa kali tembakan. Brigadir Jenderal Willy, yang menjadi Komandan RPKAD akhir dekade 1960an, hanya bisa mengakui bahwa pasukan yang terlibat baku hantam melawan pasukannya itu hanya dicap sebagai 'oknum-oknum berpakaian seragam'.<sup>79</sup>

Sementara itu, AL terus mempertahankan kebebasan hingga akhir tahun 1969. Kendati pembersihan terhadap orang-orang KKO dan tubuh AL terus berjalan, mereka terus bertahan walau sadar mereka akan kalah pada akhirnya. Sebuah perubahan terjadi. Seperti

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 208.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 266.

<sup>79</sup> Harold Crouch, *op. cit.*, hlm. 266: Surabaya Post 16 Juni 1967: Surabaya Post 19 Juni 1967; Harian KAMI 12 September 1967

yang diinginkan Suharto untuk menstabilkan rezim Orde Barunya, terjadi pergantian perwira teras AL. Hartono diganti sebagai pimpinan KKO pada September 1968 dan dijadikan Duta Besar di Korea Utara pada 1969. Sementara, Panglima AL Lakasmana Mulyadi digantikan oleh Laksmana Muda Sudomo pada akhir tahun 1969. Mulyadi lalu dijadikan sebagai Duta Besar di Uni Sovyet. Sejak pergantian itu, KKO mulai kehilangan sifat otonominya karena komando dari pimpinan AL menjadi dominan.<sup>80</sup>

Di tubuh Angkatan Laut, Suharto lalu menciptakan Operasi Ikan Paus untuk menghabiskan pengikut Sukarno di KKO. Sebagai prajurit, Hartono begitu loyal pada Presiden yang memang panglima tertinggi Angkatan Bersenjata. Ucapan dari prajurit senior KKO yang menjadi panglima KKO itu berbuntut panjang ketika penguasa baru naik panggung sejarah Indonesia. Hartono akhirnya harus tewas secara misterius di tahun 1970—ketika Hartono menjadi Duta Besar RI di Korea Utara. Konon ini juga bagian dari Operasi Ikan Paus. Korps ini kerap dituduh akan mengembalikan kekuasaan Sukarno.<sup>81</sup>

Para loyalis dilemahkan. Hartono sendiri kemudian digeser. Dia dilengserkan dulu baru belakangan muncul tuduhan padanya mendukung G 30 S. Padahal, Hartono hanya berusaha setia pada Presiden Sukarno—yang pelan-pelan kekuasaannya digerogeti, apapun tuduhan terhadap Hartono dan KKO. Menurut Manoar Nababan, Hartono sebagai jenderal KKO adalah idola kaum muda.<sup>82</sup> Selanjutnya, pada 1968, Hartono menyerahkan komando administratif KKO kepada Major Jenderal Mukijati.

Hartono sudah cukup setia pada Sukarno. Tak hanya setia, tapi juga taat pada perintah Sukarno untuk tidak berperang melawan

---

80 Harold Crouch, hlm. 266-267.

81 Soegeng Sarjadi, *Drama Politik Tanpa Skrip: Menelusuri Pemikiran Soegeng Sarjadi*, Bandung, Rosda Karya & Soegeng Sarjadi Sinyndicated, 1998. hlm. 185.

82 Manoar Nababan, *Intelejen dan Security*, Jakarta, Lembaga Studi Kapasistas Nasional, 2004, hlm. 16.



Suharto dan pasukannya. Sukarno tak menginginkan pertumpahan darah. Padahal Hartono siap sedia menanti perintah untuk menjaga Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.



Hartono disambut orang-orang

## Duta Besar di Negeri Terasing

Tahun 1968, Hartono selaku Komandan Jenderal KKO diberhentikan secara halus. Selajutnya Hartono dijadikan duta besar di Pyongyang, Korea Utara, menggantikan Asem Erningpraja.<sup>83</sup> Menempatkannya di negara yang tidak memiliki hubungan baik dengan RI tentu menjadi tekanan tersendiri bagi sang duta besar. Apalagi Korea Utara adalah salah satu negara tertutup di dunia.

Pada 8 November 1968, Hartono diangkat menjadi Duta Besar RI untuk Korea Utara. Pangkatnya naik menjadi Letnan Jenderal<sup>84</sup> Bagi perwira militer yang terbiasa bermental komandan, punya pangkat tinggi tapi tanpa pasukan, ibarat singa tanpa gigi. Tapi, sebagai militer mereka harus ikut perintah apapun yang dibebankan pada mereka.

Suka tidak suka, perintah jadi Duta Besar di Korea Utara diterima. Negeri yang dulunya dianggap Negeri Antah Berantah karena nyaris tidak dikenal oleh orang Indonesia di zaman Orde Lama. Orang hanya Tahu Negeri Belanda, Amerika atau Inggris untuk negara-negara barat karena pernah berinteraksi di masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Untuk di Asia orang Indonesia tahu Jepang yang 3,5 tahun menduduki Indonesia; Tiongkok karena sudah ada hubungan sejak zaman kerajaan; India seperti juga Tiongkok yang hubungan sudah ribuan tahun. Tapi Korea adalah nama baru.

Meski masih di Asia, tak begitu jauh dengan Jepang, Korea Utara sulit dijangkau. Di negeri terasing ini, hanya ada pesawat dari Moskow saja. Mereka tak buka hubungan dengan Jepang. Harus melewati Moskow adalah siksaan tersendiri bagi keluarga Hartono.

Bagi Grace, Korea Utara adalah negara yang sunyi. Tidak ada

---

83 Asvi Warman Adam, *op. cit.*, hlm. 243-244.

84 Julius Pour, *G 30 S: Fakta dan Rekayasa*, *op. cit.*, hlm. 632.

apa-apa di sana. Tak ada tempat berlibur. Jika ingin berlibur ke alam terbuka, mereka harus ijin pada penguasa militer. Walaupun sudah punya izin, jika mendadak tempat itu dijadikan tempat latihan militer, izin itu pun tak ada artinya. Kuasa Negara dan Militer sangat mutlak di sana. Rakyat tak butuh rekreasi di sana. Sangat sulit bagi seorang ibu yang suka membuat kue. Grace begitu kesulitan membuat kue tart. Grace akan bingung jika ada yang akan berulang tahun di rumah. Bahan membuat kue tart tak ditemukan di Pyongyang. Tak ada toko kue disana.<sup>85</sup>

Hartono tetap menerima tugasnya dengan penuh semangat. Hartono mengenakan pakaian ala Bangsawan Solo ketika menyerahkan Surat Kepercayaan sebagai Duta Besar kepada Presiden Korea Utara Choi Yung Kum. Sebelumnya, Hartono ikut memeriksa barisan kehormatan dengan berjalan memakai pakaian Bangsawan Solo juga.<sup>86</sup>

Tak hanya Hartono yang pernah alami hal ini. Sarwo Edhi pun pernah alami hal ini. Padahal Sarwo Edhi termasuk orang penting yang melahirkan Orde Baru. Untuk itu, Sarwo Edhi bahkan harus dikenal sebagai algojo yang bisa diseret ke pengadilan HAM atas kematian ratusan ribu orang sekitar tahun 1966.

Pemerintah Orde Baru mungkin masih paranoid dengan KKO— sehingga walau harus membunuh sang Jenderal, namun masih takut dengan jenazah sang korban. Gaya Orde Baru *membuang* para Jenderal yang tidak disukai memang dengan menjadikannya duta besar di negeri-negeri yang jauh dari kepentingan Indonesia. Ibrahim Adji *dibuang* ke Yugoslavia, Hartono sendiri di Korea Utara. Posisi Duta Besar harusnya diduduki oleh orang-orang dari kementerian Luar negeri yang jelas kompetensinya. Korea Utara adalah negara komunis, bahan yang baik bila suatu hari pemerintah Orde Baru memfitnah Hartono komunis lalu membunuhnya. Pastinya Hartono maupun Ibrahim Adjie akan membahayakan bila masih berada di

---

85 Wawancara Grace Walandauw (Pamulang, 16 November 2014)

86 *Korps Komando Angkatan Laut*, Juni 1969, hlm. 19.

Indonesia. Menindak mereka seperti menghukum Supardjo yang jelas terlibat G 30 S, jelas tidak mungkin karena belum cukup bukti. Hartono dan Ibrahim Adjie hanya pendukung Sukarno yang jauh dari lingkaran G 30 S.

Kemal Idris pun tak kalah loyal di awal Orde Baru. Dia pun juga kemudian dibuang ke Yugoslavia. Menurut mantan staf kedutaan di Yugoslavia, Kemal Idris nampak frustrasi dengan posisi itu. Kemal Idris lebih suka main judi kecil-kecilan. Dia mengajari staf muda main *ceki*.<sup>87</sup> Nasib Kemal cukup ironis, mengingat sejak awal karir militernya, Kemal Idris adalah orang lapangan yang efektif. Dia adalah komandan andalan. Pejabat penting yang pro Sukarno memang kerap dihabisi. Mereka biasanya diganti orang-orang yang dekat dengan Suharto dan anti Sukarno jika perlu. Sementara itu, pejabat yang disingkirkan memang sebagai Duta Besar.<sup>88</sup>

Beberapa orang akan berpikir, Hartono “dibuang sebagai duta besar” karena dia sangat loyal pada Sukarno. Kesetiaan Hartono pada Sukarno selaku Presiden RI sekaligus Pemimpin Besar Revolusi adalah kemutlakan alias “Harga Mati” prajurit TNI. Dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945 pasal 10: “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.”<sup>89</sup> Artinya, Presiden Republik Indonesia adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Setiap prajurit dan perwira ABRI atau TNI wajib menurut perintah Presiden.

Hartono adalah Panglima KKO yang dilantik Presiden. KKO adalah bagian dari Angkatan Laut RI yang juga dibawah kendali Presiden Sukarno. Itu kenapa Hartono harus loyal dan nayatanya memang loyal pada Sukarno. Tak ada yang salah dari loyalitas

---

87 Pengakuan Indra Mulya, 5 November 2007. Indra Mulya pernah tinggal di Beograd ibukota Yugoslavia kala mudanya.

88 Agus Sudibyo, *Citra Bung Karno, Analisis Berita Pers Orde Baru*, Yogyakarta, Bigrat Publishing, 1999, hlm. 128.

89 Terimakasih pada Iqbal Syafrudin yang mengingatkan saya tentang pasal ini.

Hartono pada Sukarno yang menjadi Presiden.

Masalahnya adalah pengikut Sukarno lebih terlihat sebagai masalah Orde Baru. Sebagai salah satu pengikut Bung Karno yang loyal, tentu saja Hartono dianggap berbahaya. Banyak prajurit KKO yang masih loyal pada Bung Karno dan terkesan menolak Orde Baru. Perlahan mereka dilemahkan. Hartono dikirim ke Korea Utara. Lalu anggota-anggota KKO dikeluarkan dari KKO dengan dalih menumpas G 30 S ke akar-akarnya dengan judul: Operasi Ikan Paus. Padahal, penculik jenderal Angkatan Darat justru berasal dari Angkatan Darat sendiri.

Sukarno sudah diperintahkan pergi dari istana sejak Agustus 1967, setelah Suharto pelan-pelan menguasai Indonesia. Tahun 1968, penyakit Sukarno bertambah parah. Ketika itu, Sukarno tinggal di Bogor yang dingin. Di hari-hari terakhirnya, konon Sukarno dirawat oleh Dokter Soerojo, seorang dokter hewan.<sup>90</sup> Hal ini dibantah banyak orang.

Sukarno akhirnya meninggal pada 21 Juni 1970. Dari beberapa cerita, kondisi Sukarno sangat lemah kesehatannya. Dia tak bisa lagi berjalan ketika menghadiri pernikahan putrinya, Megawati, dengan perwira AURI Letnan Surendro Supjarso. Sang menantu juga mengalami kecelakaan di Papua dalam tugasnya pada 22 Januari 1971.<sup>91</sup> Apapun penyebab kematian mereka, Sukarno, Hartono, bahkan menantu Sukarno, meninggal dalam waktu yang berdekatan, tak lebih dari 8 bulan.

Begitulah resiko menjadi orang yang loyal pada Sukarno. Resikonya tak hanya disingkirkan atau sulit hidupnya. Ada yang hidupnya berakhir. Tak hanya berakhir, tapi juga berusaha dilupakan dalam sejarah, ini semacam: “Dibunuh dua kali.” Dan jadilah Hartono yang loyalis menjadi *The Man Who Never Was*. Orang yang dianggap tak pernah ada dalam sejarah Indonesia.

---

90 Merdeka.com 21 Juni 2013: Peter Kasenda, *Hari-hari Terakhir Sukarno*, Jakarta, Komunitas Bambu, 2013, hlm. 227.

91 Tempo 6 maret 1971.



**Letjen Hartono bersama istri dan putri-putrinya**

## Hartono dalam Kronik

- 1 Oktober 1927 : Hartono lahir Solo. Keluarganya, Praawirosumarto tinggal di Margorejo, selatan stasiun Balapan.
- Maret 1942 : MULO bubar dan pemerintah balatentara Jepang mendirikan SMP. Hartono melanjutkan ke SMP dan sempat belajar di STM. Sebelum akhirnya masuk sekolah pelayaran.
- 1942-1945 : Hartono masuk sekolah pelayaran Tegal. Setelah selesai sekolah dia menjadi guru di sekolah pelayaran itu.
- 17 Agustus 1945 : Proklamasi Indonesia di Jakarta, Hartono sudah menjadi instruktur di sekolah pelayaran Tegal.
- September 1945 : Bersama rekan-rekan sekolah pelayaran Tegal, Hartono ikut mendirikan BKR laut di Tegal. Tak lama BKR laut berubah nama menjadi ALRI.
- 15 November 1945 : Hartono menjadi Letnan ALRI dalam Corps Marinier (CM) di Pangkalan IV ALRI Tegal.
- Maret 1946 : Corps Mariniers mengemban tugas membendung penyusupan dan pendaratan gelap tentara Belanda—yang membonceng pada tentara sekutu yang menang perang.
- 1947-1948 : Terlibat dalam perang kemerdekaan I, setelah Belanda melancarkan agresi militer Belanda pertama

- September 1948 : Ikut terlibat dalam penumpasan PKI Madiun
- 1948-1949 : Terlibat dalam perang kemerdekaan II, setelah Belanda melancarkan agresi militer Belanda kedua
- 1949-1962 : Terjadi perlawanan Kartosuwiryo di Jawa barat. Hartono terlibat dalam operasi penumpasannya sebagai perwira KKO.
- 1952-1965 : Perlawanan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan berlanjut dengan adanya DI/TII Sulawesi Selatan. Hartono terlibat dalam operasi penumpasannya sebagai perwira KKO.
- 1953-1957 : Terjadi perlawanan Daud Beureueh di Aceh yang berafiliasi dengan DI/TII Kartosuwiryo. Hartono terlibat dalam operasi penumpasannya sebagai perwira KKO.
- September 1958 : Kapten Hartono menikahi Grace Walandauw di Surabaya.
- 15 November 1961 : diangkat menjadi Panglima KKO.
- 28 Desember 1963 : Hartono berangkat ke Uni Sovyet dalam rangka tugas belajar selama 10 bulan. Sementara itu, tugas harian panglima dimandatkan kepada pejabat panglima KKO sementara ditunjuk Kolonel Herman Budoyo.
- Desember 1964 : Hartono kembali ke Indonesia dari Rusia
- 5 Januari 1965 : Serah terima atau pengembalian posisi panglima dari Herman Budiyo kepada Hartono.
- 30 September 1965 : Pasukan G 30 S mulai bergerak dibawah pimpinan Untung untuk sebuah kudeta yang gagal. Para Jenderal staf Umum AD diculik



pasukan G 30 S.

- 1 Oktober 1965 : Nama Hartono termasuk dalam daftar Dewan Revolusi yang ketua Letkol Untung.
- 2 Oktober 1965 : ALRI mengeluarkan pernyataan resmi, bahwa ALRI tidak menyetujui dan tidak membenarkan Gerakan 30 September. Menteri/Panglima Angkatan Laut dan Panglima KKO tidak tahu-menahu dan tidak terlibat dalam G 30 S.
- 3 Oktober : Hartono yang sedang di rumahnya di Menteng, dialalu didatangi Kapten zen Sukendar dan Letnan Mispam Sutanto, yang ingin meminjam alat selam untuk mengangkat jenazah korban G 30 S
- 10 Maret 1966 : Sekitar pukul 12.00 sampai 14.00 Presiden bersama Soebandrio, Leimena dan Chaerul Saleh sengaja menemui Mayor Jenderal Hartono, Panglima KKO di Markas KKO Cilandak, pinggir selatan Jakarta.
- November 1965 : Setelah G 30 S dan Sukarno mulai digerogeti kekuasaannya oleh AD (Suharto dan Nasution), Hartono mengucapkan "*Hitam kata Bung Karno, Hitam kata KKO; Putih Kata Bung Karno, putih kata KKO.*"
- 27 November 1966 : Hartono ditunjuk sebagai Menteri/Deputi Panglima Angkatan Laut, namun masih merangkap Panglima KKO
- Juni 1967 : Terjadi baku tembak antara KKO dengan anggota AD—yang pastinya pro Suharto dan Orde Baru—di Probolinggo.
- 1 April 1967 : Terjadi perlawanan /pemberontakan dan Gerombolan Cina Komunis (G.T.K.) yang

merupakan gabungan antara Pasukan Gerilya Rakyat Serawak (P.G.R.S.) dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PARAKU) yang timbul di Kalimantan Barat. Hartono punya andil operasi penumpasannya.

- 8 November 1968 : Hartono diangkat menjadi Duta Besar RI untuk Korea Utara. Pangkatnya naik menjadi Letnan Jenderal
- 1970 : Sukarno meninggal dunia karena penyakitnya yang takakan sembuh.
- Desember 1970 : Hartono sudah di Jakarta. Dia mulai diperiksa dan mulai dicap terlibat G 30 S.
- 6 Januari 1971 : Hartono ditemukan tewas di rumahnya. Terdapat luka tembak di bagian kepala. Selanjutnya dia dibawa ke RS Cipto Mangunkusumo.
- 7 Januari 1971 : Hartono dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.
- 8 Februari 2008 : Nyonya Grace diundang Korps Marinir untuk menghadiri pergantian nama Ksatriaan Marinir Cilandak menjadi Ksatriaan Marinir Hartono

## Lampiran

DEKRIT No. I

### TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN REVOLUSI INDONESIA

Demi keselamatan Negara Republik Indonesia, demi pengamanan pelaksanaan Pantja Sila dan Panitia Azimat Revolusi seluruhnya, demi keselamatan Angkatan Darat dan Angkatan Bersenjata pada umumnya, pada waktu tengah malam hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Ibukota Republik Indonesia Djakarta, telah dilangsungkan gerakan pembersihan terhadap anggota-anggota apa jang menamakan dirinya buh “Dewan Djenderal” jang telah merentjanakan coup mendjelang Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965.

Sedjumlah Djenderal telah ditangkap, alat-alat komunikasi dan objek-objek vital lainnya di Ibukota telah djatuh sepenuhnya kedalam kekuasaan “Gerakan 30 September”. “Gerakan 30 September” adalah gerakan semata-mata dalam tubuh Angkatan Darat untuk mengachiri perbuatan sewenang-wenang Djenderal-Djenderal anggota Dewan Djenderal serta perwira-perwira lainnya jang mendjadi kakitangan dan simpatisan anggota Dewan Djenderal. Gerakan ini dibantu oleh pasukan-pasukan bersenjata diluar Angkatan Darat.

Untuk melantjarkan tindak-landjut daripada 30 September 1965, maka oleh pimpinan Gerakan 30 September akan dibentuk Dewan Revolusi Indonesia jang anggotanya terdiri dari orang-orang sivil dan orang-orang militer jang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve. Untuk sementara waktu, mendjelang Pemilihan Umum Madjelis Permusjawaratan Rakjat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Revolusi Indonesia mendjadi sumber daripada segala kekuasaan dalam Negara Republik Indonesia.

Dewan Revolusi Indonesia adalah alat bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mewujudkan Pantja Sila dan Panca Azimat Revolusi seluruhnya. Dewan Revolusi Indonesia dalam kegiatannya sehari-hari akan diwakili oleh Presidium Dewan yang terdiri dari Komandan dan Wakil-Wakil Komandan Gerakan 30 September.

Dengan jatuhnya segenap kekuasaan Negara ketangan Dewan Revolusi Indonesia, maka Kabinet Dwikora dengan sendirinya berstatus demisioner. Sampai pembentukan Dewan Menteri oleh Dewan Revolusi Indonesia, para bekas Menteri diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan rutine, menjaga ketertiban dalam Departemen masing-masing, dilarang melakukan pengangkatan pegawai baru dan dilarang mengambil tindakan-tindakan yang bisa berakibat luas. Semua bekas Menteri berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada Dewan Revolusi Indonesia c.q. Menteri-menteri baru yang akan ditetapkan oleh Dewan Revolusi Indonesia.

Sebagai alat dari pada Dewan Revolusi Indonesia, di daerah dibentuk Dewan Revolusi Provinsi (paling banyak 25 orang), Dewan Revolusi Kabupaten (paling banyak 15 orang), Dewan Revolusi Kecamatan (paling banyak 10 orang), Dewan Revolusi Desa (paling banyak 7 orang), terdiri dari orang-orang sipil dan militer yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve. Dewan-Dewan Revolusi Daerah ini adalah kekuasaan tertinggi untuk daerah yang bersangkutan, dan yang di Provinsi dan Kabupaten pekerjaannya dibantu oleh Badan Pemerintah Harian (BPH) masing-masing, sedangkan di Kecamatan dan Desa dibantu oleh Pimpinan Front Nasional setempat yang terdiri dari orang-orang yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve.

Presidium Dewan Revolusi Indonesia terdiri dari Komandan dan Wakil-Wakil Komandan Gerakan 30 September. Komandan dan Wakil-Wakil Komandan Gerakan 30 September adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua dewan Revolusi.

Segera sesudah pembentukan Dewan Revolusi Daerah, Ketua Dewan Revolusi yang bersangkutan harus melaporkan kepada Dewan Revolusi setingkat di atasnya tentang susunan lengkap anggota Dewan. Dewan-Dewan Revolusi Provinsi harus mendapat pengesahan tertulis dari Presidium Dewan Revolusi Indonesia, Dewan Revolusi Kabupaten harus mendapat pengesahan tertulis dari Dewan Revolusi Provinsi, dan Dewan Revolusi Kecamatan dan desa harus mendapat pengesahan tertulis dari Dewan Revolusi Kabupaten.

#### KOMANDO GERAKAN 30 SEPTEMBER

Djakarta, 1 Oktober 1965.

Komandan : Letnan Kolonel Untung

Wakil Komandan : Brigdjen Supardjo

Wakil Komandan : Letnan Kolonel Udara Heru

Wakil Komandan : Kolonel Laut Sunardi

Wakil Komandan : Adjun Komisararis Besar Polisi Anwas

Diumumkan oleh Bagian Penerangan Gerakan 30 September pada tanggal 1 Oktober 1965.

Pada waktu dan ditempat sebagaimana diuraikan diatas, telah ditandatangani sendiri kedudukannya sebagai Komandan gerakan 30 September" merangkap "Ketua Dewan Revolusi Indonesia" berturut "Keputusan No 1 tentang susunan Dewan Revolusi Indonesia" dan "Keputusan No 2 tentang penurunan dan kenaikan pangkat" dan telah mengirimkan/menjuruh mengirimkan untuk disiarkan selalui siaran Sentral Radio Republik Indonesia dengan maksud tudjuan membudjuk masyarakat pada umumnya dan tamtama serta bintang Angkatan Bersendjata Republik Indonesia pada chususnja untuk mendukung Gerakan 30 September.

Isi Keputusan No I dan Keputusan No 2 adalah sebagai berikut:

KEPUTUSAN No. I

TENTANG SUSUNAN DEWAN REVOLUSI INDONESIA

Memenuhi isi Dekrit No I tentang pembentukan Dewan Revolusi

Indonesia, maka dengan ini diumumkan anggota-anggota lengkap dari Dewan Revolusi Indonesia:

1. Letnan Kolonel Untung, Ketua Dewan
2. Brigdjen Supardjo, Wakil Ketua Dewan
3. Letnan Kolonel Udara Heru, Wakil Ketua Dewan
4. Kolonel Laut Sunardi, Wakil Ketua Dewan
5. Adjun Komisaris Besar Polisi Anwas, Wakil Ketua Dewan
6. Omar Dhani, Laksamana Madya Udara
7. Sutjipto Judodihardjo, Inspektur Djenderal Polisi
8. E. Martadinata, Laksamana Madya Laut
9. Dr Subandrio
10. Dr. J Leimena
11. Ir. Surachman
12. Fatah Jasin (golongan Agama)
13. K.H. Siradjudin Abas (golongan Agama)
14. Tjugito (golongan Komunis)
15. Arudji Kartawinata
16. Sjiauw Ghiok Tjan
17. Sumarno S.H.
18. Hartono, Majdjen KKO
19. Sutarto, Brigdjen Polisi
20. Zaini Mansur (Front Pemuda Pusat)
21. Jahja S.H (Front Pemuda Pusat)
22. Sukatno (Front Pemuda Pusat)
23. Bambang Kusnohadi (PPMI)
24. Rahman (Wakil Sekdjen Front Nasional)
25. Hardojo (Mahasiswa)
26. Basuki Rachmat, Majdjen
27. Ryacudu, Brigdjen
28. Solichin, Brigdjen
29. Amir Machmud, Brigdjen
30. Andi Rivai, Brigdjen
31. Sudjono, Major Udara

32. Leo Watimena, Komodor Udara
33. Dr. Utami Surjadarma
34. Latief, Kolonel
35. Umar Wirahadikusuma, Majdjen
36. Nj. Supeni
37. Nj. Mahmudah Mawardi
38. Nj. Suharti Suwanto
39. Fatah, Kolonel
40. Suharman, Kolonel
41. Samsu Sutjipto, Kolonel Laut
42. Suhardi (Wartawan)
43. Drs. Sumartono, Komisaris Besar Polisi
44. Djunta Suwardi
45. Karim D.P. (Persatuan Wartawan Indonesia)

Ketua dan Wakil-Wakil Ketua merupakan Presidium Dewan Revolusi Indonesia yang diantara dua sidang lengkap Dewan bertindak atas nama Dewan.

Semua anggota Dewan Revolusi Indonesia dari kalangan sivil diberi hak memberi hak memakai tanda pangkat Letnan Kolonel atau yang setingkat. Anggota Dewan Revolusi Indonesia dari kalangan Angkatan Bersendjata tetap dengan pangkat lama, ketjuali yang lebih tinggi dari Letnan Kolonel diharuskan memakai yang sama dengan pangkat Komandan Gerakan 30 September atau yang setingkat.

#### KOMANDAN GERAKAN 30 SEPTEMBER

Ketua Dewan Revolusi Indonesia

ttd.

(Letnan Kolonel Untung)<sup>92</sup>

---

92 *Gerakan 30 September Dihadapan Mahmilub 2 Di Djakarta (Perkara Untung)*, Jakarta, Pusat Pendidik Kehakiman AD (AHM\_PTHM), hlm 252-317.

## Referensi Bacaan:

### Artikel:

- Alexander Arief, *Wong Solo dalam Pusaran G 30 S*, [www.wong-sangar.blogspot.com](http://www.wong-sangar.blogspot.com), Diakses 29 September 2013.
- *In Memoriam: Letkol KKO EWA Pangalila*, [http://garudamilter.blogspot.com/2013/02/kami-bukanlah-pahlawan-tapi-kenanglah\\_21.html](http://garudamilter.blogspot.com/2013/02/kami-bukanlah-pahlawan-tapi-kenanglah_21.html)
- *Pembunuhan Letjen (KKO) Hartono* <http://petromaks.wordpress.com/2006/02/page/2/> Diakses 16 September 2007 pukul 16.40.

### Suratkabar:

- Harian KAMI 12 September 1967
- Kompas, 24 Januari 1971.
- *Korps Komando Angkatan Laut*, Djuni 1969: nomor 1, Januari 1965: nomor 12, Desember 1964: nomor 14, 15 Nopember 1963 (nomor istimewa hari ulang tahun ke XIII) nomor 15, Desember 1963: Nopember 1965; Nomor 15 - Desember 1963.
- Pikiran Rakyat, 9 Januari 1971: 12 Januari 1971.
- Surabaya Post 16 Juni 1967: 19 Juni 1967.
- Tempo 6 maret 1971.
- *Tjakrabirawa* (Majalah Bulanan) no 5 edisi Juni 1963.

### Buku:

- Abdul Haris Nasution (1984) *Memenuhi Panggilan Tugas: Jilid 4 Masa Pancaroba Kedua*, Jakarta, Gunung Agung.



- Abdul Haris Nasution (1986) *Masa Kebangkitan Orde Baru (jilid VI)*, Jakarta, CV Haji Masagung.
- Agus Sudibyo (1999), *Citra Bung Karno*, Analisis Berita Pers Orde Baru, Yogyakarta, Bigraf Publishing.
- Crouch, Harold (1999) *Militer & Politik Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan.
- Forum Silaturahmi Anak bangsa (2013) *The Children of War*, Jakarta, Kompas.
- Hendro Subroto (2009), *Sintong Panjaitaan: Perjalanan Seorang Prajurit Parakomando*, Jakarta, Kompas
- Julius Pour & Mangil Martowidjojo (2001) *Kesaksian Tentang Bung Karno*, Jakarta, Grasindo.
- Julius Pour (2010) *Gerakan 30 September; Pelaku, Pahlawan & Petualang*, Jakarta, Kompas.
- Junaedi Dkk (2005) *60 Tahun Pengabdian Korps Marinir*, Jakarta, Dinas Penerangan Korps Marinir.
- Julius Pour (2013) *G 30 S: Fakta dan Rekayasa*, Jakarta, Kata.
- Manoar Nababan (2004) *Intelijen dan Security*, Jakarta, Lembaga Studi Kapasistas Nasional.
- Maulwi Saelan (2008) *Dari Revolusi 45 Sampai Kudeta 66: Kesaksian Wakil Komandan Tjkrabirawa*, Jakarta, Visi Media.
- Nurinwa Hendrowinoto (1998) *M. Yasin. Saya Tidak Pernah Minta Ampun Kepada Suharto (Sebuah Memoar)*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Peter Kasenda (2013) *Hari-hari Terakhir Sukarno*, Jakarta, Komunitas Bambu.
- Radik Djarwadi (1959) *Pradjurit Mengabdi Gumpalan Perang Kemerdekaan Bataljon Y*, Jakarta, Pusat Sedjarah Militer.
- Ramadhan K.H (1994) *Soemitro: Mantan Pangkoptamtib: Dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkoptamtib*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Rosihan Anwar (2006) *Sukarno, PKI dan Tentara*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

- Rudi Badil dkk (2009) *Soe Hok Gie Sekali Lagi: Buku Pesta dan Cinta dalam Bangsanya*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia.
- Sandhausen, Ulf (1988) *Politik Militer Indonesia: Menuju Dwifungsi ABRI*, Jakarta, LP3ES.
- Soegeng Sarjadi (1988) *Drama Politik Tanpa Skrip: Menelusuri Pemikiran Soegeng Sarjadi*, Bandung, Rosda Karya & Soegeng Sarjadi Sinyndicated.
- Sudono Jusuf (1971) *Sedjarah Perkembangan Angkatan Laut*, Jakarta, Pusat sedjarah ABRI.
- Tim Penyusun (1980) *Sedjarah kesehatan Angkatan Laut*, Jakarta, Angkatan Laut.
- Tim Penyusun (1990) *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid IX*, Jakarta, Cipta Adi Perkasa.
- Tim Penyusun (tanpa tahun) *Gerakan 30 September Dihadapan Mahmilub 2 Di Djakarta (Perkara Untung)*, Jakarta, Pusat Pendidik Kehakiman AD (AHM\_PTHM).
- Tim Penyusun (2005) *Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Periode Perang kemerdekaan 1945-1950)*, Jakarta, Dinas Penerangan TNI AL.

## Tentang Penulis




Petrik Matanasi (Lahir di Balikpapan, tahun 1983) Pernah kuliah sejarah di UNY (2002-2009). Mulai membaca buku-buku sejarah sejak kelas 5 SD dan menulis sejak kuliah. Masih menulis dan bertahan hidup dengan mengajar sejarah di Sampoerna Academy di Bogor.



-  **Jasa Penerbitan Buku**
-  **Jasa Editing Naskah**
-  **Jasa Layout Buku**
-  **Jasa Desain Cover**
-  **Jasa Cetak Buku**
-  **Jasa Pengurusan ISBN**
-  **Jasa Penulisan Naskah**

 **penerbitsibuku@gmail.com**

 **085643895795**

 **www.sibuku.com**

 **Penerbit Sibuku**

 **@PenerbitSibuku**